

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

***DISASTER MANAGEMENT* DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN BENCANA DI  
KABUPATEN TANA TIDUNG**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**SAMSUL BAHRI**

**NIM. 501575204**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2019**

**ABSTRACT****DISASTER MANAGEMENT IN DISASTER MANAGEMENT EFFORTS  
IN TANA TIDUNG DISTRICT**

SAMSUL BAHRI  
samsul.hanitifa@gmail.com

Graduate Program  
Open University

In accordance with Law No. 24 of 2007 the presentation of the Tana Tidung Regency RPB document covers the implementation of Tana Tidung District disaster management in 3 stages namely the reduction of threat levels (Hazard Reduction), the reduction of vulnerability (Vulnerability Reduction) and capacity building (Capacity Development).

Disaster Management is one of the management processes for potential disaster risks. Disaster risk assessment and assessment is carried out by reviewing and mapping hazard levels, vulnerability and capacity levels, based on hazard index, exposed population index, loss index and capacity index.

The results show that the Tana Tidung District Disaster Management Agency's Work System is directed at disaster risk reduction, strengthening disaster management capacity, optimizing control instruments, using space in disaster risk reduction. The Tana Tidung District Disaster Management Agency's Disaster Management System focuses on the implementation of improvements, especially in policies that consider various aspects of the transformation transformation, among others, can be seen from the economic, social and community perceptions and the Tana Tidung District Disaster Management System in Mitigation, addressing disasters and the impact of disasters related to social conditions policies that are explained about changes that occur in health conditions, conditions of education, social activities and social relations

**Keywords:** Disaster Management, Natural Disasters, BPBD Tana Tidung

## ABSTRAK

### DISASTER MANAGEMENT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TANA TIDUNG

SAMSUL BAHRI  
samsul.hanitifa@gmail.com

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

Sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 penyajian dokumen RPB Kabupaten Tana Tidung ini mencakup penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Tana Tidung pada 3 tahapan yakni pengurangan tingkat ancaman (*Hazard Reduction*), pengurangan tingkat kerentanan (*Vulnerability Reduction*) dan peningkatan kapasitas (*Capacity Development*).

Disaster Manajemen merupakan salah satu proses pengelolaan terhadap adanya potensi serta resiko bencana. Pengkajian dan penilaian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya (*hazard*), tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan tingkat kapasitas, berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas.

Hasil menunjukkan Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada pengurangan resiko bencana, penguatan kapasitas penanggulangan bencana, optimalisasi instrumen pengendalian, pemanfaatan ruang dalam pengurangan resiko bencana. Sistem Pengelolaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung fokus pada penerapan perbaikan khususnya pada kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek perubahan transformasi tersebut antara lain dapat dilihat dari kondisi ekonomi, sosial serta persepsi masyarakat dan Sistem penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam Mitigasi, mengatasi bencana dan dampak bencana berkaitan dengan kebijakan kondisi sosial yang dijelaskan mengenai perubahan yang terjadi dalam kondisi kesehatan, kondisi pendidikan, aktivitas kemasyarakatan dan relasi sosial

Kata Kunci : Disaster Manajemen, Bencana Alam , BPBD Tana Tidung

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang Disaster Management Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten TanaTidung adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, Desember 2018  
Yang Menyatakan



SAMSUL BAHRI  
NIM 501575204

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Disaster Management Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Tana Tidung.

Penyusun TAPM : Samsul Bahri

NIM : 501575204

Program Studi : Magister Adminisrasi Publik

Hari / Tanggal : juma,at, 1 Desember 2018

Menyetujui :

Pembimbing II

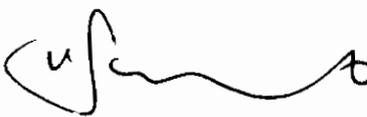
Pembimbing I

  
Dr. Agus Santosa, M.M  
 NIP.19580818198603 1 005

  
Dr. Suharno, M.Si  
 NIP.19680417 200003 001

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial  
 dan Politik

  
Dr. Darmanto, M.Ed  
 NIP.19591027 198603 1 003

Dekan FHISIP

  
Dr. Sofyan Arifin, M.Si  
 NIP.19660619 199203 1 002

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Samsul Bahri  
 NIM : 501575204  
 Program Studi : Magister Adminisrasi Publik  
 Judul/Tema : " Disaster Management Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Tana Tidung."

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Progam studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka Pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 02 Desember 2018

Waktu : 19.00 – 20.30 WIB

Dan telah di nyatakan : **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua Komisi Penguji :

Nama : Dr. Agus Santoso, M.Si

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A

Pembimbing I :

Nama : Dr. Suharno, M.Si

Pembimbing II :

Nama : Dr. Agus Santosa, M.M

Sekretaris Komisi :

Nama : Dr. Ir. Suroyo, M.Sc

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan YME yang memiliki bumi langit dan diantaranya. Atas segalalimpahan rahmat-Nya yang terus mengalir kepada seluruh umatnya, khususnya kepada penulis. Karena atas kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan thesis ini dengan waktu yang ditentukan, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik.

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Disaster Management Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Tidung”. Penulis menyadari bahwa Thesis ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu mengirimkan doa dan penuh kasih sayangnya, mengarahkan penulis hingga menjadi seperti saat ini, serta istri, dan anak-anak aku yang tercinta dan keluarga besar yang telah mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis.
2. DR.H. Undunyah MH.MSi sebagai Bupati Tana Tidung yang telah mendorong dan memberikan kesempatan penulis untuk melanjutkan pendidikan
3. Dosen pembimbing I. Bapak DR.Suharno, M.Si dan Pembimbing II. Bapak DR. Agus Santosa, MM yang telah banyak membantu dengan memberikan semangat, arahan dan selalu menyediakan waktunya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.

4. Dosen penguji ahli Prof. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.Ayang telah memberikan kritikan dan masukan untuk penulis sehingga menjadi lebih baik dalam penulisan tesis ini dan menjadikan motivasi bagi penulis untuk lebih giat belajar.
5. Ketua komisi Dr. Agus Santoso, M.Si dan Sekretaris Komisi Dr. Ir. Suroyo, M.Sc yang telah bersedia meluang waktunya demi terselenggaranya ujian Sidang UPBJJ-Tarakan dengan sukses.
6. Kepala UPBJJ – Tarakan Dr. Sopian Arifin dan Jajarannya.

Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan tesis ini.

Penulis sadar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu kritik dan saran dan perbaikan yang bersifat konstruktif dan membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan tulisan ini ke depan.

Tarakan, Desember 2018

**Penulis**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Penelitian .....	ii
ABSTRACT.....	iii
ABSTRAK.....	iv
Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Lembar Layak Uji .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Kajian Teori.....	12
2.1.1 Manajemen .....	12
2.1.2 Disaster Manajemen .....	14
2.1.3 Bencana .....	20
2.1.4 Tata Ruang Wilayah .....	23
2.1.5 Teori Organisasi .....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Berpikir.....	38
2.4 Operasional Konsep.....	39
2.4.1 Batasan Lingkup .....	39
2.4.2 Konsep .....	40

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1. Desain Penelitian.....	40
3.2. Sumber Informasi.....	42
3.3. Instrumen Penelitian.....	42
3.4. Prosedur Pengumpulan Data.....	43
3.5. Metode Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	46
4.2. Hasil.....	54
4.2.1 Sistem Kerja BPBD Kab Tana Tidung.....	54
4.2.2 Sistem Pengelolaan Bencana BPBD Kab Tana Tidung.....	64
4.2.3 Sistem Penanggulangan Bencana BPBD Kab Tana Tidung (Mengatasi Bencana dan Dampak Bencana) .....	67
4.3. Pembahasan.....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>88</b>
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR TABEL**

1.1	Skor Resiko Bencana.....	1
1.2	Pembagian Wilayah .....	5
3.1	Jadwal Pengumpulan Data.....	40



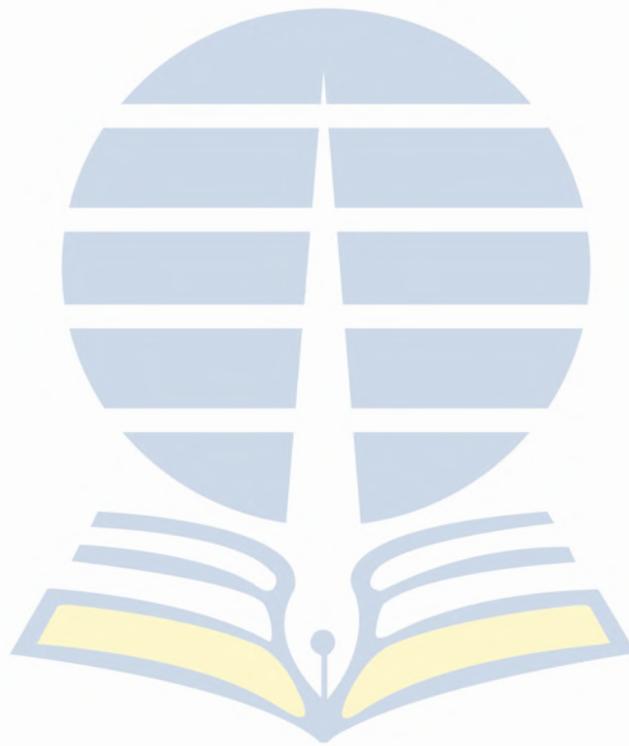
## DAFTAR GAMBAR

2.1 Proses Disaster Manajemen.....	17
2.2 Kerangka Berpikir.....	39



**DAFTAR LAMPIRAN**

1	Jadwal Penelitian.....	93
2	Kuesioner.....	94



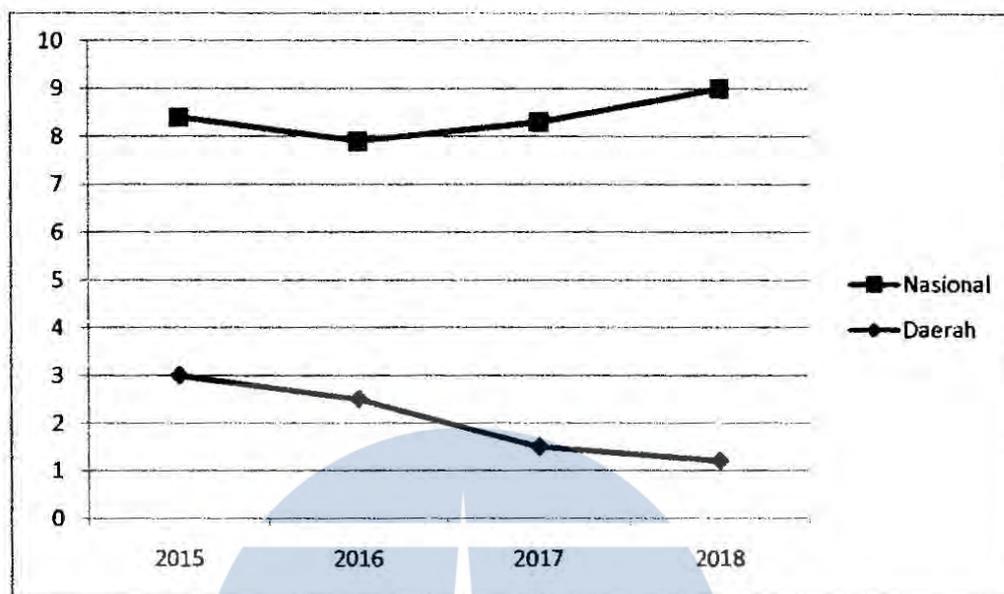
## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Potensi penanggulangan bencana alam secara nasional diketahui mulai diperbaiki dimana SOP bagi unsur-unsur penanggulangan bencana itu telah ditetapkan, institusi yang menjadi komandannya adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Willem memastikan, tidak mesti merubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk menerbitkan SOP. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menambahkan, SOP itu memang sangat dibutuhkan dalam penanganan dampak bencana alam. Hal itu demi percepatan penanganan sekaligus pemulihan daerah terdampak. "Memang perlu aturan detail alias SOP itu. Supaya begitu terjadi bencana, semua unsur itu, TNI, Polri, Kementerian PU-PR, Kementerian Sosial sampai kepala daerah bisa langsung mengetahui apa yang harus dikerjakan. Pemerataan penanggulangan bencana nasional ini disebabkan oleh adanya ketimpangan seperti piramida terbalik antara jumlah wilayah yang ditanggulangi cukup minim dibandingkan dengan jumlah wilayah bencana alam yang belum berhasil ditanggulangi ([nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com)).

Berikut data ketimpangan penanggulangan bencana dimulai dari skala nasional kemudian per daerah di seluruh Indonesia, dimana rata-rata penanggulangan bencana yang terjadi di daerah masih minim bantuan dibandingkan dengan bencana alam yang terjadi di wilayah kota besar di pulau Jawa

Gambar 1.1 Grafik Piramida Kesenjangan Penanggulangan Bencana Alam



Sumber: Kompas.com

Berdasarkan grafik di atas diketahui terdapat ketimpangan dalam penanggulangan bencana alam di wilayah daerah terpencil dibandingkan wilayah perkotaan di pulau Jawa yang mudah diakses dengan cepat, perbedaan kondisi geografis, sumber daya manusia menjadi salah satu faktor ketimpangan tersebut.

Kondisi geografi dan demografi merupakan dua faktor penting dan mendasar yang menentukan keberhasilan pembangunan. Kondisi geografi akan memberikan gambaran tentang ketersediaan sumberdaya alam, mulai dari luas lahan, mineral dan bahan tambang yang terkandung di dalamnya, hingga fisiografi lahan beserta flora dan fauna yang berada di atasnya. Sedangkan, kondisi demografi merupakan gambaran tentang ketersediaan sumberdaya manusia, baik ditinjau dari aspek kualitas maupun kuantitasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung.

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten ini kemudian di sahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi Kabupaten ke-10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilantiknya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 tentang pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, maka Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu kabupaten pada wilayah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah administrasi seluas 4.828,58 km<sup>2</sup>, dengan ibukota kabupaten terletak di Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, terdiri dari 3 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Kabupaten Tana Tidung, maka dipandang perlu pemekaran wilayah kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2012, wilayah kecamatan Kabupaten Tana Tidung bertambah menjadi 5 wilayah kecamatan. Sehingga Wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 Kecamatan dan 29 Desa/Kelurahan. yaitu Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia Kecamatan

Betayau dan Kecamatan Muruk Rian. Melalui peta padu serasi Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan  
Sebelah Timur : Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan  
Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan  
Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

Wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 kecamatan atau 32 Desa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Sesayap, luas wilayah sekitar 1.016,92 Km<sup>2</sup> membawahi 7 Desa, yaitu Desa Tideng Pale, Limbu Sedulun, Sebidai, Sedulun, Tideng Pale Timur, Gunawan dan Sebawang.
2. Kecamatan Sesayap Hilir, luas wilayah sekitar 1.317,53 Km<sup>2</sup> membawahi 8 Desa, yaitu Desa Sesayap, Sengkong, Bebatu, Badan Bikis, Sepala Dalung, Seludau, Menjeletung, dan Sesayap Selor.
3. Kecamatan Tana Lia, dengan luas 877,86 Km<sup>2</sup> membawahi 5 Desa, yaitu Desa Tanah Merah, Tengku Dacing, Sambungan, Tanah Merah Barat, Sambungan Selatan.
4. Kecamatan Betayau, dengan luas 1.007,65 Km<sup>2</sup> membawahi 6 Desa, yaitu Desa Buong Baru, Bebakung, Kujau, Mendupo, Maning, dan Periuk.
5. Kecamatan Muruk Rian, dengan luas 608,62 Km<sup>2</sup> membawahi 6 Desa, yaitu Seputuk, Rian, Balayan Ari, Rian Rayo, Kapuak, Sapari

Tabel I.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa
1	Sesayap	1.016,92	7
2	Sesayap Hilir	1.317,53	8
3	Tana Lia	877,86	5
4	Betayau	1.007,65	6
5	Muruk Rian	608,62	6
	Jumlah	4.828,58	32

Sumber: Perda No. 5 Tahun 2011 dan Perda No. 10 Tahun 2012

Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Utara, secara astronomi terletak diantara 116° 42' 50" - 117° 49' 50" Bujur Timur dan 3°12 '02" - 3° 46' 41" Lintang Utara. Kabupaten Tana Tidung berada di tengah-tengah antara Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang merupakan jalur strategis perekonomian. Berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau, dan Nunukan. Gambaran karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung dapat dideskripsikan berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada. Wilayah Kabupaten Tana Tidung terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu: kawasan perbukitan dan kawasan non perbukitan. Kawasan perbukitan termasuk hutan, hutan lindung, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis. Sedangkan kawasan Non perbukitan meliputi daerah pemukiman penduduk, zona pertanian, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis.

Sedangkan karakteristik dasar Kabupaten Tana Tidung dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam (minyak bumi) dan gas, batubara, emas, sumberdaya hutan, ketersediaan lahan perkebunan, dan wilayah perairan yang luas);

- b. Kabupaten Tana Tidung berada diantara Kota Tarakan, Kab. Bulungan Kab. Malinau, dan Kab. Nunukan yang merupakan jalur perekonomian yang strategis;
- c. Kabupaten Tana Tidung berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau dan Nunukan (Serawak-Sabah).

Kondisi Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbuit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan terjal dan kemiringan yang tajam. Ibukota Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale Kecamatan Sesayap. Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul (35.291,76 ha) dan sungai yang terpanjang adalah sungai Sesayap (576 km). Sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Rian yang berada di Kecamatan Sesayap dengan ketinggian 250 m. Berdasarkan topografi Kabupaten Tana Tidung berada di ketinggian antara 250 m.dpl - 680 m.dpl di atas permukaan laut. Di Kabupaten Tana Tidung terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara, perbukitan dengan pegunungan dengan ketinggian  $\pm$  500 m di atas permukaan laut. Berdasarkan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Tana Tidung cukup bervariasi dari 0-2% sampai lebih dari 40%, dataran rendah hanya sebagian besar di daerah Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Bebakung, Muruk Rian maupun Tana Lia. Wilayah Kabupaten Tana Tidung didominasi dengan kelerengan/ kemiringan tanah 0-8% (datar).

Secara historis di wilayah Kabupaten Tana Tidung telah sering terjadi kejadian bencana yang meliputi:

1. Genangan air/banjir,

2. Gelombang ekstrim yang mengakibatkan angin kencang (puting beliung),
3. Kebakaran bangunan yang terjadi di lingkungan daerah industri dimana lokasi tersebut dekat dengan lokasi permukiman,
4. Kegagalan teknologi dan limbah industri penyebab pencemaran lingkungan.
5. Kekeringan terutama ketersediaan air untuk areal persawahan serta kebutuhan air bersih untuk dikonsumsi masyarakat
6. Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Tana Tidung

Sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2007, penyajian dokumen RPB Kabupaten Tana Tidung ini mencakup penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Tana Tidung pada 3 tahapan, yaitu: Pra Bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi: Dalam situasi tidak terjadi bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: Perencanaan penanggulangan bencana; Pengurangan risiko bencana; Pencegahan; Pemaduan dalam perencanaan pembangunan; Persyaratan analisis risiko bencana; Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; Pendidikan serta pelatihan; dan Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi: Kesiapsiagaan; Peringatan dini; dan Mitigasi bencana.

Saat tanggap darurat dan pemulihan segera (*early recovery*) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya; Penentuan status keadaan darurat bencana; Penyelamatan dan evakuasi

masyarakat terkena bencana; Pemenuhan kebutuhan dasar; Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Pasca Bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tana Tidung pada tahap pasca bencana meliputi: Rehabilitasi; dilakukan melalui kegiatan: Perbaikan lingkungan daerah bencana; Perbaikan prasarana dan sarana umum; Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; Pemulihan sosial psikologis; Pelayanan kesehatan; Rekonsiliasi dan resolusi konflik; Pemulihan sosial ekonomi budaya; Pemulihan keamanan dan ketertiban; Pemulihan fungsi pemerintah; dan Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi; dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi: Pembangunan kembali pra sarana dan sarana; Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan Peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi; Kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Terdapat 3 upaya yang tercantum di dalam RPB bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni : Pengurangan tingkat ancaman (*Hazard Reduction*), Pengurangan tingkat kerentanan (*Vulnerability Reduction*) dan Peningkatan kapasitas (*Capacity Development*). Prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Tana Tidung akan disesuaikan tingkat risikonya (*risk*) yang didalamnya terdapat unsur bahaya/ ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*Capacity*) daerah berdasarkan hasil pemetaan risiko serta masukan

dari para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusunan RPB ini dan menjadi acuan dalam penilaian evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tana Tidung. Pelayanan penanganan bencana yang dilaksanakan terhadap kejadian bencana yang sudah terjadi di wilayah Kabupaten Tana Tidung dinilai masih perlu untuk ditingkatkan menjadi lebih cepat, lebih tepat, lebih efektif dan lebih efisien, dalam rangka mendukung dan memberdayakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP).

Kondisi lapangan yang dialami oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) menghadapi berbagai kendala khususnya situasi demografi dan topografi wilayah Tana Tidung yang memiliki kawasan hutan luas dan sungai yang cukup lebar dalam jumlah banyak menyebabkan kesulitan terkait proses penanggulangan bencana dimulai dari pencegahan hingga rekonstruksi lokasi bencana. Keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Kabupaten Tana Tidung dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menurunkan risiko bencana di wilayah tersebut. Secara khusus, dengan adanya kebijakan otonomi daerah, RPB memiliki peranan yang berbeda bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan peranannya di dalam sistem pemerintahan, pelaksanaan RPB di dalam lingkup internal Kabupaten Tana Tidung terbatas pada fungsi koordinasi, fasilitasi dan motivasi Pemerintah Kabupaten kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan kabupaten Tana Tidung. Sementara bagi pemerintah kabupaten dokumen RPB Kabupaten Tana Tidung dapat digunakan sebagai acuan

penyusunan strategi dan program penanggulangan bencana yang telah disesuaikan dengan kondisi spesifik kabupaten Tana Tidung.

Menurut Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) terbitan tahun 2013, yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, secara multi ancaman bencana, Kabupaten Tana Tidung pada kelas Risiko Tinggi dengan nilai atau skor sebesar 150. Dengan rincian skor risiko bencana tiap ancaman sebagai berikut:

Tabel 1.2 Skor Resiko Bencana

NO	ANCAMAN	SKOR	KELAS RISIKO
1	Banjir	35	Tinggi
2	Gempa Bumi	11	Sedang
3	Tsunami	Tidak Ada	Rendah/ Tidak Ada Ancaman
4	Tanah Longsor	11	Sedang
5	Gunung Api	Tidak Ada	Rendah/ Tidak Ada Ancaman
6	Gelombang Ekstrim (berakibat angin kencang) dan Abrasi	23	Tinggi
7	Kebakaran Lahan dan Hutan	34	Tinggi
8	Cuaca Ekstrim (Angin Topan)	14	Sedang
9	Kekeringan	22	Tinggi
	TOTAL SKOR RISIKO	150	TINGGI

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, diperlukan upaya penanggulangan bencana di wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung yang diawali dengan menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini. Data tersebut menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) cukup penting dalam mengatasi dan memberikan berbagai pertolongan pada masyarakat yang tertimpa bencana. Dokumen RPB Kabupaten Tana Tidung berisikan strategi serta program yang akan dilakukan oleh BPBD sebagai upaya penurunan risiko bencana di wilayah Kabupaten Tana Tidung dimana program tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan

Kabupaten Tana Tidung. Penyusunan dokumen ini didasarkan atas hasil kajian risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang kemudian dijabarkan ke dalam program kegiatan penanggulangan bencana beserta pagu indikatif anggaran yang sesuai. Ruang lingkup RPB Kabupaten Tana Tidung terbagi atas ruang lingkup geografis, ruang lingkup tahap bencana, ruang lingkup tipe bencana dan pola umum penyelenggaraan.

Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (*hazard potency*) yang sangat tinggi, beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 2 (dua) kelompok utama potensi bencana di wilayah Indonesia yaitu potensi bahaya utama (*main hazard*) dan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*). Potensi bahaya utama (*main hazard*) dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusan gunung api, peta potensi bencana banjir. Sedangkan peta potensi bencana ikutan (*collateral hazard*) dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan dan kepadatan industri berbahaya. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian berjudul **“Disaster Management Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Tidung”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung?

2. Bagaimana sistem pengelolaan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung?
3. Bagaimana sistem penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam Mitigasi, mengatasi bencana dan dampak bencana ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis sistem kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.
2. Untuk menganalisis sistem pengelolaan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.
3. Untuk menganalisis sistem penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam Mitigasi, mengatasi bencana dan dampak bencana.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan hasilnya akan mampu menjelaskan sistem kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.
2. Memperkuat teori manajemen pengelolaan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat diterapkan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan atau keputusan melakukan suatu sistem

**pengelolaan khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Tana Tidung dalam Mitigasi, mengatasi bencana dan dampak bencana.**



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Ketut Suartini, Piers A dan I Ketut (2015) berjudul “Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014”. Di mata dunia Indonesia dikenal sebagai negara yang paling rawan bencana. Berbagai potensi bencana dapat terjadi di Indonesia. Namun dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, di Indonesia masih tergolong rendah. Bermula dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan mengambil topik Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang dilaksanakan di Kabupaten Badung “ Bali di tahun 2014. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan kinerja BPBD Kabupaten Badung dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja yang ditemui di tahun 2014. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kinerja menurut Agus Dwiyanto. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi dengan melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan serta melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang berhubungan dengan kinerja BPBD Kabupaten Badung dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Dari hasil temuan penelitian dan evaluasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa kinerja BPBD Kabupaten Badung secara garis besar sudah baik dan memuaskan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Hal tersebut berhasil karena adanya faktor pendukung kinerja, namun tidak dapat dipungkiri terdapat pula faktor penghambatnya. Maka dari itu, diharapkan kedepannya BPBD Kabupaten Badung dapat meningkatkan kinerjanya agar dapat lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan tetap memperhatikan produktivitas, kuliatas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas dalam mencapai kinerja yang maksimal sesuai dengan pedoman LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) BPBD Kabupaten Badung. Serta diharapkan pula dapat memanfaatkan segala sumber daya yang ada dengan baik dan bijaksana. Sehingga pada akhirnya upaya pengurangan resiko bencana yang berbasis masyarakat dan mewujudkan Badung yang Mandiri dan Tanggung bencana dapat tercapai. Hasil ini menunjukkan bahwa evaluasi kinerja yang ditujukan pada salah satu instansi pemerintah dapat membantu sebagai bahan evaluasi pembentukan kebijakan strategis.

2. Penelitian kedua yakni Sikumbang E (2016) yang berjudul Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Asoek Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Kota Padang). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif serta pendekatan kualitatif dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BPBD Kota Padang ditinjau dari aspek kesiapsiagaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana pada tahun 2014 dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja yang ditemui di tahun

2014. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan BPBD Kota Padang pada bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, dan wawancara dengan warga sekitar Kota Padang serta LSM LP2M. Serta data sekunder dari BPBD berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) selama Dua tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa BPBD Kota Padang kinerjanya cukup memuaskan, namun diharapkan kedepannya BPBD Kota Padang dapat meningkatkan kinerjanya dengan terus melaksanakan program dan kegiatan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan tetap memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh BPBD Kota Padang, dan dalam mencapai kinerja yang maksimal sesuai dengan pedoman LAKIP BPBD Kota Padang. Selanjutnya diharapkan agar BPBD perlu secara terus menerus melakukan edukasi kepada masyarakat dan dalam rangka mitigasi bencana di Kota Padang dan lebih kreatif dalam mencari sumber dana dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, agar program-program dan kegiatan-kegiatan mitigasi bencana yang tidak dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan. Kata Kunci : Evaluasi, Kinerja, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana

3. Penelitian ketiga yakni Rendry Mamahit (2013) yang berjudul “Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Kepuasan Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Utara. Setiap instansi pada umumnya selalu berusaha meningkatkan kinerja para pegawai, termasuk dengan cara memberi pendidikan, pelatihan serta menciptakan kepuasan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat

pendidikan, pelatihan dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara. Populasi dalam Penelitian ini berjumlah 79 orang dan sampel berjumlah 44 orang. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pelatihan dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja pegawai, oleh karena itu kepala BPBD dan unsur pimpinan lainnya dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai sebaiknya memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai seperti tingkat pendidikan, pelatihan dan kepuasan kerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari para pegawai.

4. Penelitian keempat yakni Rivky, Slivya dan Yantje (2015) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja, Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Sumber daya manusia hanyalah salah satu dari beberapa sumber daya lain yang dimiliki oleh sebuah organisasi, tetapi Sumber Daya Manusia menjadi sumber daya yang paling menentukan terhadap sumberdaya yang lain. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Disiplin Kerja, Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai. Obyek dari penelitian ini adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Manado, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif, alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Data diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada 43 Pegawai sebagai responden dari seluruh populasi 76 pegawai pada Kantor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pengambilan sample berdasarkan metode confidence Sampling. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis yang diterima yaitu hipotesis H1, H3 dan H4 dimana Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai, Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai, Disiplin Kerja, Kompetensi, Motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

5. Penelitian kelima yakni Rhesa Wibowo Putra (2015) dengan penelitian berjudul "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kutai Barat". Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kutai Barat dibawah bimbingan Dr. Rita Kalalinggi, M.Si dan Eddy Iskandar, S.Sos, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai pengelolaan dan penanggulangan terutama dalam pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan dalam menanggulangi banjir yang dilakukan oleh BPBD Kutai Barat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Pelaksana, Sekertaris, Kasubag Perencanaan Program, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Kabid Kedaruratan dan Logistic. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu sumber daya manusia yang tidak berkompeten dalam

bidangnya, koordinasi yang dibangun oleh BPBD baru terbangung ketika bencana terjadi, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Saran peneliti diharapkan agar dapat merekrut relawan yang berkompeten dibidangnya dan juga pelatihan-pelatihan guna membentuk koordinasi yang baik dalam menanggulangi bencana banjir serta peran pemerintah dalam membantu sarana dan prasarana agar penyelenggaraan bencana banjir dapat berjalan dengan lancar.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Manajemen

Manajemen berasal dari kata *manage* yang memiliki arti mengatur. Hal yang diatur yakni unsur manajemen yang berkaitan dengan *man, money, methods, machines, materials* dan *market*. Manajemen dikaitkan dengan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem manajemen yang baik akan memudahkan sebuah organisasi atau institusi menapau tujuan dengan meningkatkan hasil guna unsur-unsur manajemen yang dimiliki. Menurut Siagian (2010 :12) menjelaskan bahwa manajemen merupakan tindakan dalam pencapaian tujuan organisasi dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan agar tujuan organisasi tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

Definisi manajemen sangat bervariasi sesuai dengan pandangan individu yang menggunakan sistem manajemen tersebut. manajemen memiliki ciri khusus terkait dengan tujuan, kerjasama dan sarana yang digunakan. Manajemen sebagai proses dapat terlihat dari gerak langkah dalam pencapaian tujuan yang diselesaikan dengan cara rasional, efisien dan efektif sehingga tiap individu yang terlibat dalam kerjasama pada sistem tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan,

mengelola bahkan menyelesaikan masalah yang ada dalam institusi atau organisasi tersebut.

Menurut Siagian (2010:102) menjelaskan bahwa fungsi manajemen yakni sebagai berikut :

- a. Perencanaan, dimana dalam perencanaan pada penyelenggaraan manajemen secara operasional dalam suatu organisasi memiliki makna sebagai usaha pemikiran yang teratur guna memilih alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan pengertian bahwa perencanaan merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat sebagai pelaksana kegiatan untuk mencapainya. Perencanaan sebagai usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan untuk memajukan perkembangan organisasi tertentu.
- b. Pengorganisasian, merupakan langkah kedua dalam pelaksanaan fungsi manajemen. Pengorganisasian dilakukan guna mengefektifkan dan mengefisiensikan kerjasama sebab pengorganisasian dapat menilai tingkat kepentingan dalam setiap aktivitas yang harus dilakukan. Tujuan yang dilakukan akan sangat luas sehingga memerlukan organisasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem kualitas dan kuantitas satuan kerja organisasi yang dapat mendukung tujuan kerjasama sehingga membutuhkan sistem kelola dalam menerapkan standar serta struktur organisasi dengan tujuan memberikan hasil maksimal.

c. Penggerakan, dimana sebagai fungsi organik ketiga dari manajemen setelah perencanaan serta pengorganisasian yang telah dilakukan. Penggerakan merupakan tindakan membuat sumber daya baik sumber daya manusia maupun teknologi melakukan berbagai aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Penggerakan senantiasa diikuti dengan penerarahan tenaga dan memberikan bimbingan kepada sumber daya manusia agar berbagai aktivitas yang dilakukan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

d. Pengawasan

Menurut Siagian (2010:319) pengawasan merupakan segenap kegiatan untuk menyakinkan atau menjamin berbagai pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Berbagai kebijakan telah ditetapkan, diikuti dan dipatuhi sesuai perintah yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kerja guna mencapai target yang telah ditentukan. Dalam proses pengawasan pihak operasional atau pihak pelaksana lapangan harus mengukur target yang hendak dicapai dalam menilai pelaksanaan kerja, mengadakan tindakan perbaikan serta penyesuaian yang dipandang ada penyimpangan.

Manajemen pengetahuan atau *knowledge management* merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengelola pengetahuan yang dimiliki seseorang atau organisasi, dimana yang dimaksud dengan pengelolaan adalah identifikasi, pencarian penyimpanan, kolaborasi, proses dan sebagainya yang bertujuan untuk penciptaan sesuatu hal yang baru atau dengan kata lain merujuk kepada kemampuan individu untuk mengelola pengetahuan. Pengetahuan mengenai

manajemen adalah bidang kegiatan yang ditujukan untuk mencegah semua jenis bencana yang ada kaitannya dengan lingkungan . Pengetahuan mengenai bencana alam dikenal adanya SMART *Safety* yang berarti *Safety Management and Attitude Reinforcement Technique*. Berdasarkan konsep ini pengelolaan (manajemen) bencana alam dilakukan dengan mengintegrasikan aspek manajemen bencana alam, teknis, dan perbaikan perilaku (*Behavioral Base Safety*).

Pendekatan SMART *Safety* memiliki tiga pilar utama yaitu (1) *safety management system*, (2) *operational safety*, (3) *behavior safety*. Berikut ini penjelasannya :

1. Pendekatan kesisteman atau standar dan administratif (*safety management system*). Pendekatan ini lebih diarahkan bagaimana menerapkan konsep kesisteman, seperti prosedur kerja, sistem pengawasan, dokumentasi, dan sebagainya.
2. Pendekatan teknis (*engineering approach*) yang lebih bersifat operasi sesuai dengan sifat kegiatan, seperti (*process safety*).
3. Pendekatan manusia (*human approach*) untuk membangun manusia dengan budaya perbaikan bencana alam.

Pendekatan ketiga adalah melalui perilaku manusia dirasa penting dan menjadi target dari penelitian ini. Oleh karena itu, kinerja pegawai sangat ditentukan oleh unsur manusia atau operator, dan manajemen yang menjalankannya. Pada teori ini (Ramli, 2009) mengatakan bahwa manusia sebagai pemegang kunci keselamatan. perilaku manusia yang baik, kinerja perbaikan bencana alam dapat meningkat tinggi. Manusia dengan kompetensi tinggi dan budaya perbaikan bencana yang prima akan mampu menghilangkan kondisi teknis

yang kurang baik atau sistem dan prosedur yang belum sempurna. Pada proses manajemen pada organisasi perlu adanya pembentukan sikap. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian antara reaksi terhadap suatu stimulus tertentu dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap derajat sosial. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap object di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek menurut Soekidjo Notoatmojo (2003) dalam Budiharjo (2016).

Menurut *Notoatmojo*, sikap terdiri dari beberapa tindakan yaitu:

- a. Menerima, diartikan sebagai seseorang atau subyek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan *object*.
- b. Merespon, diartikan sebagai memberi jawaban bila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah indikasi dari sikap.
- c. Menghargai, diartikan mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah, suatu indikasi sikap tingkat 3
- d. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi.

Menerima dan merespons artinya mereka memperhatikan masalah-masalah tentang bencana alam dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tetapi jarang ada mereka yang mengajak orang lain untuk mendiskusikan atau mengerjakan hal-hal berkenaan dengan bencana alam. *Teory Planned Behavior* oleh Icek Azjen (2005), yang menyatakan bahwa niat untuk melakukan tindakan akan sangat dipengaruhi oleh keyakinan perilaku, keyakinan normatif dan

keyakinan kontrol. Ketiga-tiganya bermuara pada niat yang pada gilirannya akan menyebabkan perilaku

Gambar 2.1.

Pengaplikasian KM (*Knowledge Management*) melalui TPB (*Theory of Planned Behavior*).

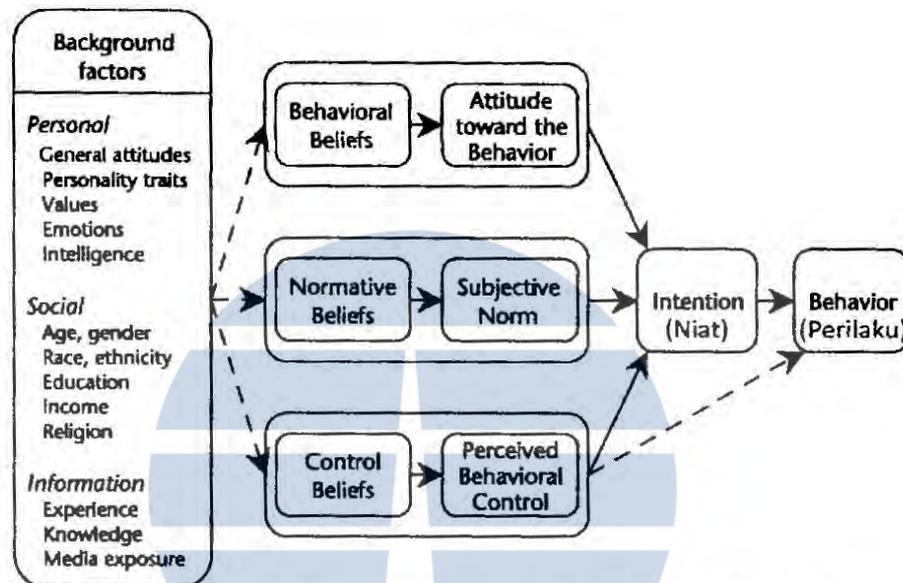


Figure 6.3 The role of background factors in the theory of planned behavior

Sumber : Icek Azjen (2005)

*Theory of planned behavior*, *intention* (mau / niat) dan *behavior* (perilaku) merupakan fungsi dari tiga penentu dasar, yakni: (1) pribadi perseorangan secara alami, (2) refleksi dari pengaruh lingkungan sosialnya, (3) pengendalian sikap.

- (1) Pribadi perseorangan secara alami atau mewakili individual's *attitude toward the behavior* (sikap seseorang) sesuai bagan di atas. *Attitude* (sikap) ini lebih mengacu pada evaluasi positif atau negatif masing-masing individu dalam menyikapi hal tertentu sesuai dengan pribadi secara personalnya.

- (2) Refleksi dari pengaruh lingkungan sosialnya atau perwakilan dari *subjective norm*, merupakan persepsi perseorangan (individu) dari penekanan nilai-nilai sosialnya dalam menentukan perilaku yang akan dilakukan atau tidak dengan pertimbangan tertentu terlebih dahulu.
- (3) Pengendalian sikap yang disadari (*perceived behavior control*), merupakan kemampuan untuk melakukan perilaku (*behavior*) yang dikehendaki.

Dalam *theory of planned behavior*, *perceived behavior control* merupakan faktor yang paling penting dibandingkan dengan dua lainnya. *Intention* (niat) merefleksikan dengan tepat kemauan individu tersebut untuk coba melakukan *behavior* (perilaku) yang dikehendaki, sedangkan *perceived control* adalah kemungkinan untuk mempertimbangkan beberapa kendala-kendala realistik yang mungkin ada.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Konsep TRA adalah niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor penentu yaitu *attitude toward behavior* (sikap) dan *subjective norm* (Ajzen dan Fishbein, 2005). Sedangkan TPB merupakan pengembangan dari teori TRA dengan menambahkan satu lagi faktor penentu yakni *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991). Gambar berikut ini menjelaskan alur TPB dengan implikasi di lembaga atau organisasi. *Attitude toward Behavior* (Sikap) merupakan salah satu faktor penentu dalam diri seseorang yang dialami untuk memberi respon positif maupun negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. Kuhl and Beckmann (1985), “ *Attitude toward the behavior is the degree to which a person has a favorable or unfavorable evaluation of a*

*behavior. It depends on the person's assessment of the expected outcomes of the behavior*". Teori ini dapat membantu kita dalam memprediksi dan memahami lebih dalam tentang seberapa besar kecenderungan individu atau kelompok dalam melakukan pekerjaan atau penyikap / berperilaku secara spesifik. Kemudian Sikap dalam bahasan penelitian ini diartikan sebagai penilaian positif ataupun negatif terkait upaya penanggulangan bencana alam.

Menurut Knight *and* Howes (2003) norma subjektif dinilai sebagai penerimaan tekanan sosial untuk menampilkan sebuah perilaku yang spesifik. Norma subjektif merupakan peraturan yang diciptakan menjadi sebuah kebiasaan sehingga untuk menanamkan kebiasaan tersebut diperlukan paksaan atau tekanan yang dapat memunculkan perilaku yang sesuai. Selanjutnya Ajzen *and* Fishben (2005) menerangkan bahwa "*The Subjective norm is the person's perception that most people who are important to him think he should or should not perform the behavior in question*". Mereka mendefinisikan jika norma subyektif merupakan persepsi individu berhubungan dengan kebanyakan dari orang-orang yang penting bagi dirinya mengharapkan individu untuk melakukan atau tidak melakukan tingkah laku tertentu, orang-orang yang penting, bagi dirinya itu kemudian dijadikan acuan atau patokan untuk mengarahkan tingkah laku.

Norma subjektif merupakan dasar penentu / determinan kedua dari intensi dalam teori *planned behavior*, norma subyektif pun masih terkait dengan *believes* (keyakinan-keyakinan). Namun *belief* pada norma subyektif berbeda jenis dengan *belief* dalam sikap karena *belief* dalam norma subyektif adalah representasi persepsi dari *significant others* (tokoh panutan) baik perorangan maupun

kelompok tertentu yang kemudian mempengaruhi individu apakah akan menampilkan perilaku atau tidak.

Norma subyektif menurut Ajzen dan Fishben (2005) ditentukan oleh dua hal yaitu :

- a. *Normative belief*, merupakan keyakinan yang berhubungan dengan pendapat tokoh atau orang lain baik perorangan maupun kelompok yang penting dan berpengaruh bagi individu yang biasa disebut dengan *significant others* (tokoh panutan) yang menjadi acuan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Maka individu termotivasi untuk melakukan tingkah laku tersebut.
- b. *Motivation to comply*, yaitu seberapa jauh motivasi individu untuk mengikuti pendapat tokoh panutan tersebut.

Motivasi merupakan aspek penting dalam menentukan perilaku seseorang salah satunya yakni perilaku kerja. Motivasi dapat mendorong seseorang untuk mengarahkan spesifikasi perilaku tertentu dalam sebuah kegiatan. Motivasi dalam hal ini ditujukan agar pegawai bekerja dengan produktif, mampu bekerja sama dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan organisasi lembaga atau organisasi yakni menerapkan pola kerja yang mengedepankan keselamatan kerja. Lingkungan kerja yang motivasional mampu menyediakan reward sesuai kinerja yang diberikan (Malayu,2000).

Motivasi dapat mengubah energi pada masing-masing individu melalui sistem neurophysiological yang ada dalam diri manusia yang berdampak pada kegiatan fisik manusia. Motivasi dapat memberikan perasaan baru secara afeksi pada diri seseorang yang berdampak pada tingkah laku individu. Motivasi

dibentuk sebagai akibat dari pembentukan tujuan oleh organisasi. Motivasi pada umumnya berasal dari lingkungan yang kemudian muncul dalam diri individu berhubungan dengan tujuan yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan (Birchard & Nirooja, 2014). Motivasi mendorong individu secara sadar untuk berperilaku agar tergerak melakukan kinerja terbaik dan produktif sehingga mencapai tujuan tertentu (Cheng, 1998). Daya penggerak individu dalam melakukan berbagai aktivitas tertentu dengan mengerahkan berbagai daya, potensi serta kemampuan yang dimiliki untuk mengerjakan berbagai pekerjaan dan tugas serta mengarahkan sesuai tujuan.

Motivasi dengan tujuan merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Uno (2008) menjelaskan bahwa motivasi berasal dari kata motif yang dijelaskan sebagai pendorong individu dalam bertindak untuk melakukan sesuatu. Motivasi dalam penelitian ini terkait dengan motivasi perubahan. Dorongan individu untuk berubah yang disebabkan oleh motivasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Kondisi atau keadaan tertentu yang bersifat memaksa menuju perubahan menjadi alasan kuat yang dihubungkan dengan kebutuhan seorang individu. Motivasi menjadi salah satu alasan perubahan untuk menyiapkan berbagai hal guna melanjutkan aturan atau sistem baru yang diterapkan dalam sebuah organisasi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Setyobroto (1989) yang menjelaskan bahwa motivasi memiliki peranan dalam mengubah atau mendasari tingkah serta perilaku individu berdasarkan pola pikir, kebutuhan serta kondisi yang melatarbelakangi. Peran motivasi mampu mengendalikan berbagai kegiatan sesuai tujuan ketika motivasi dan tujuan tersebut sejalan, searah dan sesuai tidak bertentangan.

Motivasi mengandung makna nilai dalam individu yang dipahami dan dipercaya sebagai pegangan yang dapat mendorong individu untuk bergerak. Nilai sebagai konsep dasar dalam memilih perilaku, menilai yang lain dan menghadap fakta, menjelaskan, kemudian membenarkan dan mengevaluasi perilaku. Nilai sebagai tujuan atau kriteria untuk setiap situasi, didasarkan pada arti dari nilai-nilai itu sebagai kehidupan prinsip. Nilai juga menunjukkan bagaimana sebuah ide abstrak dalam masyarakat yang digunakan bersama, secara implisit atau eksplisit, tentang apa yang baik dan hal yang benar akan tercapai (Schwartz et al, 2001). Dari karakteristik ini, dapat didefinisikan sebagai kognitif seseorang yang menunjukkan representasi emosi sekitar tiga tipe dasar kehidupan manusia secara universal dan secara biologis. Ketiga jenis itu termasuk (a) kebutuhan manusia sebagai organisme, (b) permintaan interaksi sosial untuk orang-orang koordinasi, (c) permintaan lembaga sosial untuk kebersamaan. Jadi, nilainya bisa tumpang tindih individu dan kolektif (Schwartz & Bardi, 2001). Nilai bisa diartikan sebagai standar seseorang memilih dan mengevaluasi perilaku, peristiwa, dan orang-orang. Nilai ditawarkan sebagai sesuatu yang penting hal dalam hubungan interpersonal.

Kelompok nilai membentuk sistem prioritas nilai. Budaya dan individu dapat dicirikan oleh sistem prioritas nilai ini, jadi definisi nilai bisa berbeda dalam 2 tingkat unit analisis, individu dan budaya (Smith dan Schwartz, 1997). Perbedaan unit analisis dari tuntutan nilai ada perbedaan dalam instrumen pembentuk yang digunakan dalam pengukuran nilai. Pertama adalah nilai dalam analisis budaya satuan. Dalam konteks ini, budaya mewakili bagaimana ide abstrak dalam masyarakat digunakan bersama-sama, secara implisit atau eksplisit,

tentang apa yang baik dan benar akan terjadi. Nilai budaya ini adalah dasar untuk norma khusus menginformasikan kepada individu tentang perilaku yang sesuai dalam situasi apa pun (Schwartz *et al*, 2001).

Nilai dalam tingkat analisis yang secara budaya digunakan untuk mengkarakterisasi budaya tertentu, sesuatu yang terlihat adalah ide abstrak tentang sesuatu yang baik, benar, dan dapat diterima di masyarakat tertentu (Smith dan Schwartz, 1997). Manusia memiliki relatif program mental yang stabil. Mental ini program mempengaruhi cara berpikir dan perilaku orang lain. Kedua adalah nilai dalam analisis individu satuan. Di tingkat analisis individu, nilai merupakan tujuan mengarahkan motivasi prinsip hidup (Smith dan Schwartz, 1997). Hubungan antara perbedaan nilai mencerminkan konflik pengalaman psikodinamik dan individual apropriasi ketika menggunakan nilai dalam bukunya kehidupan. Bahkan Rokeach membagi nilai dalam 2 istilah, nilai pribadi dan sosial. Pribadi nilai terpusat ke individu dan berfokus pada hubungan intrapersonal, sementara nilai sosial terpusat pada komunitas dan berfokus pada hubungan interpersonal. Di tingkat pribadi, George England didefinisikan nilai dan sistem nilai sebagai seseorang kerangka persepsi. Dalam penjelasannya, nilai lebih mungkin untuk sebuah ideologi atau filsafat hidup. Pendekatan itu tidak sangat berbeda dengan Rokeach, bedanya hanya pada pengaturan instrumen nilai.

Menurut Fishbein dan Ajzen (2004) dalam Suhariadi (2016) bahwa *Theory Planned Behavior* menjelaskan niat (motivasi) untuk melakukan tindakan perubahan akan sangat dipengaruhi oleh keyakinan perilaku, keyakinan normatif dan keyakinan kontrol. Ketiga-tiganya bermuara pada niat (motivasi) yang pada gilirannya akan menyebabkan perilaku siap dalam menghadapi perubahan.

Niat yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan memiliki situasi yang berbeda bagi tiap individu. Menurut Teori Hierarki Kebutuhan Maslow terdapat salah satu level kebutuhan yakni keamanan dalam hal ini seperti keamanan dan kestabilan kondisi salah satunya keselamatan dan keamanan kerja serta asuransi kesehatan (Kotler, 2004). Studi ini mengarahkan niat pegawai dalam melaksanakan aturan didasari atas faktor kebutuhan keselamatan dan keamanan. Intensi (niat) dalam kamus besar bahasa Inggris-Indonesia melalui kata dasarnya memiliki arti maksud, pamrih, atau tujuan, disengaja. *Intention* yang artinya adalah niat. Intensi (niat) adalah penetapan tujuan hasil dari sebuah perkiraan perilaku. Niat dengan kata lain *intention* menurut Ajzen (2005), sangat dipengaruhi oleh pengambilan sikap terhadap suatu perilaku, norma-norma subyektif dan adanya pengendalian perilaku yang disadari (kesadaran).

Niat dalam bahasan penelitian diartikan sebagai kemauan untuk melaksanakan program atau terlibat di dalam implementasi aturan. Sikap dan perilaku dalam berdisiplin kerja ditandai oleh berbagai inisiatif dan kehendak untuk mentaati peraturan. Artinya, orang yang dikatakan mempunyai disiplin yang tinggi tidak semata-mata patuh dan taat terhadap peraturan secara kaku, tetapi juga mempunyai kehendak (niat) untuk menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan lembaga atau organisasi.

Teori Sosial Kognitif (*Social Learning Theory*) yang dikembangkan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa salah satu komponen adanya perubahan perilaku dengan adanya penekanan pada kognitif dari pikiran, pemahaman serta evaluasi. Teori ini menjelaskan bahwa ada proses kesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan (Bandura, 2006). Pengaruh lingkungan tersebut

yakni faktor dari organisasi dimana salah satunya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi identik dengan studi individu dan kelompok dalam sebuah organisasi. Interaksi antar individu dalam sebuah organisasi menggambarkan budaya organisasi tersebut. Budaya organisasi yang kuat akan mendukung tujuan perusahaan, sebaliknya yang lemah atau negatif akan menghambat atau bertentangan dengan tujuan perusahaan.

Robbins dan Judge (2013) menegaskan bahwa budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang diselenggarakan oleh anggota yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lain. Menurut Edy Sutrisno (2010), mendefinisikan budaya organisasi sebagai perangkat sistem nilai-nilai (*values*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (*assumptions*), atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi juga disebut budaya perusahaan, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama berlakunya, dianut bersama oleh para anggota organisasi (karyawan) sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi (perusahaan). Sistem kerja yang dibuat oleh sebuah organisasi memberikan dampak pada perilaku serta tindakan anggota organisasi tersebut.

Penerapan nilai praktik yang dianut berkembang menjadi sebuah rutinitas dan kebiasaan sehingga menjadi budaya organisasi yang senantiasa dilaksanakan anggota organisasi. Budaya organisasional adalah sistem makna, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan organisasi satu dengan organisasi lain. Budaya

organisasi menjadi identitas atau karakter utama organisasi yang dipelihara dan dipertahankan. Budaya yang kuat merupakan perangkat yang bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, karena membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga setiap karyawan pada awal karirnya perlu memahami budaya dan bagaimana budaya tersebut terimplementasikan.

Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektifitas kinerja perusahaan karena menimbulkan antara lain (Busco dan Robert, 2011):

1. Nilai-nilai kunci yang saling menjalin, tersosialisasikan, menginternalisasi, menjiwai para anggota, dan merupakan kekuatan yang tidak tampak.
2. Perilaku karyawan lebih terkendali, terkoordinasi oleh kekuatan informal dimana anggota merasa komitment dan loyalitas pada organisasi serta berbagai kegiatan ditujukan pada visi dan misi organisasi.
3. Penghargaan terhadap karyawan atas kinerja dan kontribusi dan berlaku pada tiga aspek yakni pengarahannya perilaku, kinerja organisasi dan kekuatan untuk menekan nilai budaya organisasi.

Menurut Inigo *et al* (2012) budaya organisasi dikatakan kuat, jika nilai-nilai budaya itu disadari, dipahami dan diikuti, serta dilaksanakan oleh sebagian besar para anggota organisasi. Budaya organisasi menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain sebagai identitas bagi anggota-anggota organisasi.

### 2.2.2 Disaster Manajemen

Disaster Manajemen merupakan salah satu proses pengelolaan terhadap adanya potensi serta resiko bencana (Erniati, 2016). Pengkajian dan penilaian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya (*hazard*), tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan tingkat kapasitas, berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Metodologi untuk menterjemahkan berbagai indeks tersebut ke dalam peta dan kajian diharapkan dapat menghasilkan tingkat risiko dan peta risiko untuk setiap bahaya bencana yang ada pada suatu daerah. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi Kabupaten Tana Tidung untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Pengkajian dan penilaian risiko bencana dilaksanakan dengan menggunakan metode pada Gambar. Dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Tidung ini, tidak dilakukan pengkajian risiko bencana secara menyeluruh, karena lingkup pekerjaan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak mencakup produk dari suatu Kajian Risiko Bencana yaitu Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana, dimana metodologi pengkajian harus sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB tahun No. 02 Tahun 2012 mengenai Metode Pengkajian Risiko Bencana (IRBI, 2013).

Penggunaan metodologi tersebut diikuti perlu penambahan item-item pekerjaan lain termasuk didalamnya pengadaan perangkat lunak GIS (Geographical Information System) untuk keperluan analisa. Oleh karena itu penilaian risiko bencana untuk keperluan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Tidung dilakukan dengan tetap menganalisa

komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas dari hasil survey lapangan, survey data sekunder dan masukan-masukan selama pelaksanaan FGD (Forum Group Discussion). Dari hasil analisa tersebut dapat dihasilkan indeks risiko bencana yang disusun berdasarkan komponen bahaya, kerugian dan kapasitas kemudian dalam tahap selanjutnya dapat dipetakan dalam format digital untuk ditampilkan pemetaan indeks risiko bencana tiap kecamatan.

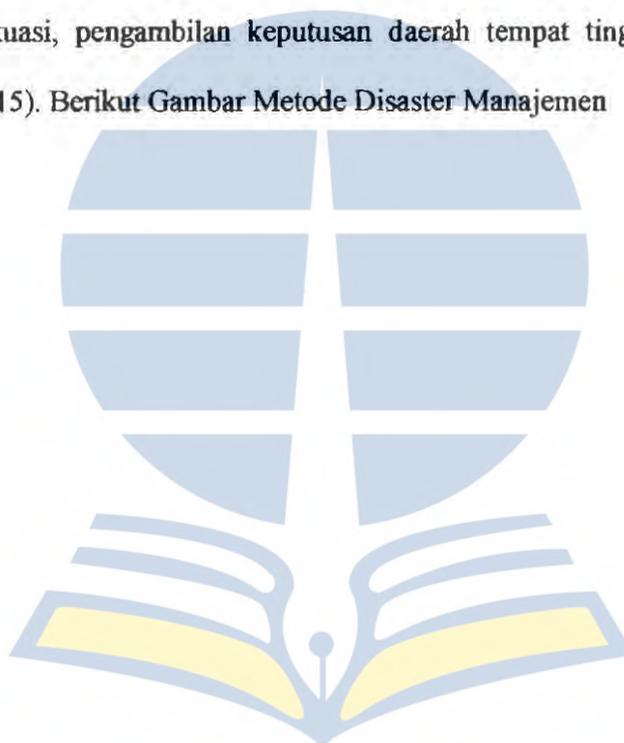
Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas, regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Pengkajian Manajemen Risiko Bencana ini bertujuan untuk :

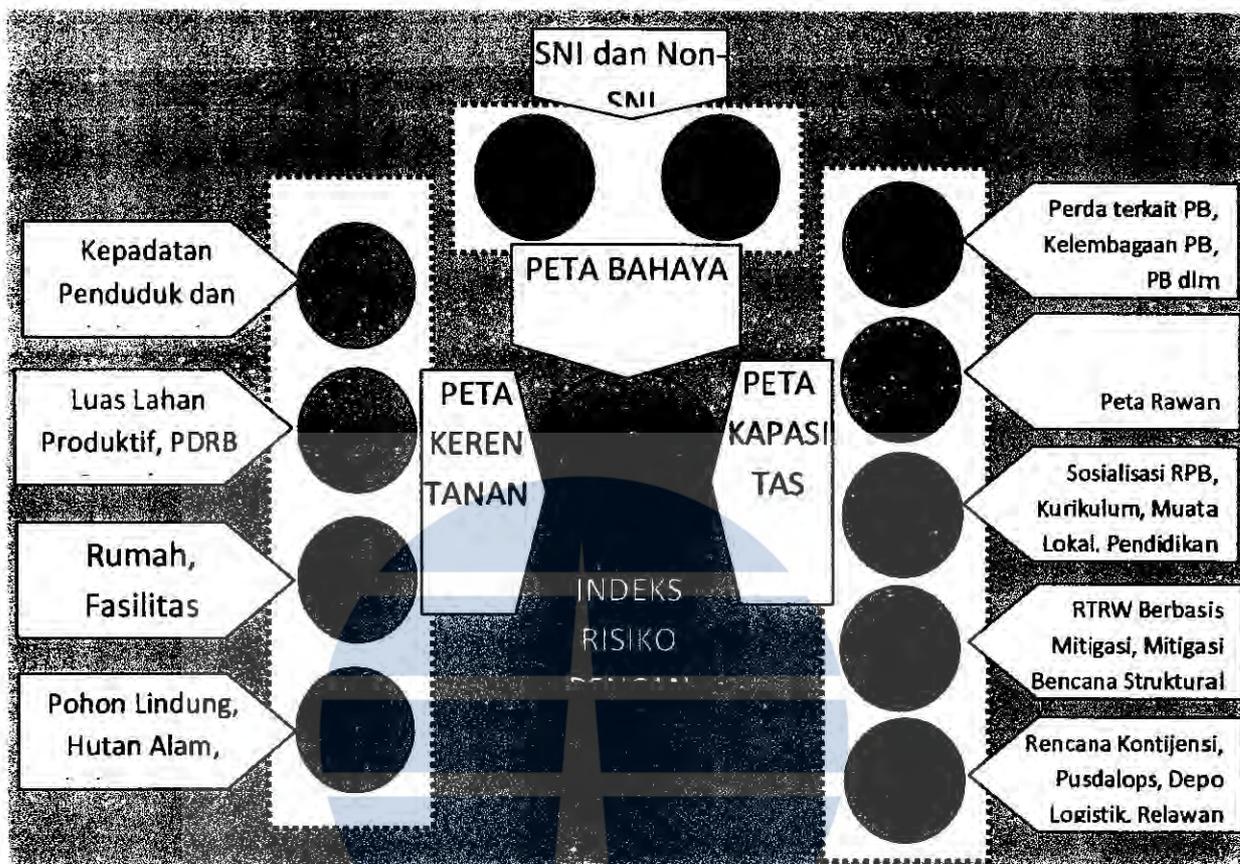
1. Mengkaji risiko setiap bencana yang ada di Kabupaten Tana Tidung;
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tana Tidung dengan berfokus kepada perlakuan beberapa parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur;
3. Menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Tana Tidung dalam kesatuan tujuan.

Pada tatanan pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan ini nantinya merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.

Pada tatanan mitra pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana. Pendampingan dan intervensi para mitra harus dilaksanakan dengan berkoordinasi dan tersinkronasi terlebih dahulu dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada tatanan masyarakat umum, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai salahsatu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusunrencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal dan sebagainya (Putra, 2015). Berikut Gambar Metode Disaster Manajemen



Gambar 2.2 Proses Disaster Manajemen



Sumber : IRBI (2013)

Berdasarkan data IRBI (2013) dijelaskan bahwa dalam proses penanggulangan bencana pada proses disaster manajemen dikaji dan diidentifikasi terlebih dahulu berkaitan dengan data yang digunakan merupakan data hasil kajian risiko yang terdiri dari data: (1) bahaya per jenis bencana, (2) jiwa terpapar per jenis bencana, (3) kerugian rupiah per jenis bencana, (4) kerusakan lingkungan dalam luasan (Ha) per jenis bencana dan (5) kapasitas pemerintah daerah per kabupaten/ kota (IRBI, 2013).

Proses disaster manajemen atau penanggulangan bencana dijelaskan sebagai berikut bahwa saat tanggap darurat dan pemulihan segera (*early recovery*) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya; Penentuan status keadaan darurat bencana; Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; Pemenuhan kebutuhan dasar; Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Pasca Bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tana Tidung pada tahap pasca bencana meliputi: Rehabilitasi; dilakukan melalui kegiatan: Perbaikan lingkungan daerah bencana; Perbaikan prasarana dan sarana umum; Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; Pemulihan sosial psikologis; Pelayanan kesehatan; Rekonsiliasi dan resolusi konflik; Pemulihan sosial ekonomi budaya; Pemulihan keamanan dan ketertiban; Pemulihan fungsi pemerintah; dan Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi; dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi: Pembangunan kembali pra sarana dan sarana; Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan Peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi; Kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Terdapat 3 upaya yang tercantum di dalam RPB bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni : Pengurangan tingkat ancaman (*Hazard Reduction*), Pengurangan tingkat kerentanan (*Vulnerability Reduction*) dan Peningkatan kapasitas (*Capacity Development*). Prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Tana Tidung akan disesuaikan tingkat risikonya (*risk*) yang

didalamnya terdapat unsur bahaya/ ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*Capacity*) daerah berdasarkan hasil pemetaan risiko serta masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusunan RPB ini dan menjadi acuan dalam penilaian evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (IRBI, 2013).

Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan. Menurut Swanson (dalam Keban,2004:193) manajemen organisasi adalah mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan budaya yang ada; apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan; apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya; apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan; dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumber dayanya. Pendapat lain dikemukakan oleh Wibawa dan Atmosudirjo (dalam Pasolong, 2007:176) bahwa : “efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif (Surjadi,2009:7).

Dari beberapa uraian diatas dapat dikatakan bahwa kemandirian melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Jadi disini bukan hanya menitikberatkan pada pencapaian tujuan belaka melainkan juga pada proses

mengelola sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya, kondisi *intern* organisasi pengaruh lingkungan luar dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat.

Makna dari adanya sistem disaster manajemen tersebut dapat dijadikan acuan, pedoman dan referensi bagi BPBD di berbagai wilayah khususnya di jangkauan wilayah daerah seperti Tana Tidung yang diharuskan berdasarkan kondisi geografis harus mampu melakukan penanggulangan bencana secara mandiri.

### 2.2.3 Teori Organisasi

Albert Bandura menjelaskan bahwa salah satu komponen adanya damoak dari organisasi yakni perubahan perilaku dengan adanya penekanan pada kognitif dari pikiran, pemahaman serta evaluasi. Teori ini menjelaskan bahwa pada individu sebagai bagian dari organisasi ada proses kesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan (Bandura, 2006). Pengaruh lingkungan tersebut yakni faktor dari organisasi dimana salah satunya adalah organisasi. Organisasi identik dengan studi individu dan kelompok dalam sebuah organisasi. Interaksi antar individu dalam sebuah organisasi menggambarkan organisasi tersebut. Organisasi yang kuat akan mendukung tujuan perusahaan, sebaliknya yang lemah atau negatif akan menghambat atau bertentangan dengan tujuan perusahaan.

Robbins dan Judge (2013) menegaskan bahwa organisasi adalah sistem makna bersama yang diselenggarakan oleh anggota dalam mencapai tujuan. Menurut Edy Sutrisno (2010), mendefinisikan organisasi sebagai institusi yang memiliki perangkat sistem nilai-nilai (*values*), keyakinan - keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (*assumptions*), atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota sebagai pedoman perilaku dan

pemecahan masalah-masalah organisasinya. Organisasi juga disebut media pengaplikasian seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama berlakunya, dianut bersama oleh para anggota organisasi (karyawan) sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi (perusahaan). Sistem kerja yang dibuat oleh sebuah organisasi memberikan dampak pada perilaku serta tindakan anggota organisasi tersebut.

Penerapan nilai praktik yang diaut berkembang menjadi sebuah rutinitas dan kebiasaan sehingga senantiasa dilaksanakan anggota organisasi. Organisasi memiliki sistem makna, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan organisasi satu dengan organisasi lain. Organisasi memiliki identitas atau karakter utama organisasi yang dipelihara dan dipertahankan. Organisasi yang kuat merupakan perangkat yang bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, karena membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga setiap karyawan pada awal karirnya perlu memahami berbagai hal tersebut terimplementasikan.

Organisasi yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektifitas kinerja perusahaan karena menimbulkan antara lain (Busco dan Robert, 2011):

1. Nilai-nilai kunci yang saling menjalin, tersosialisasikan, menginternalisasi, menjiwai para anggota, dan merupakan kekuatan yang tidak tampak.
2. Perilaku karyawan lebih terkendali, terkoordinasi oleh kekuatan informal dimana anggota merasa komitmen dan loyalitas pada organisasi serta berbagai kegiatan ditujukan pada visi dan misi organisasi.

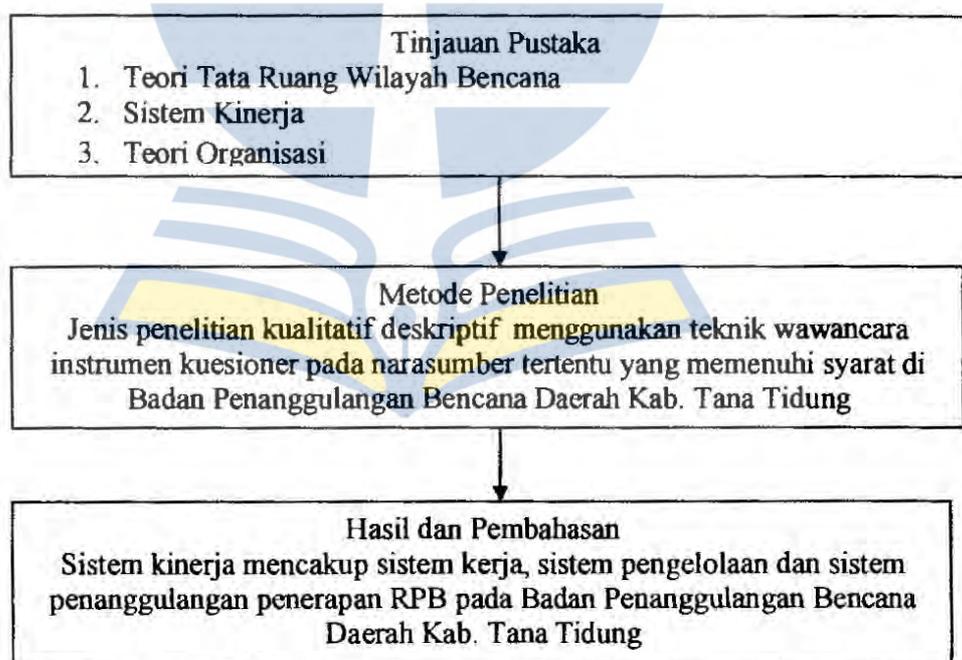
3. Penghargaan terhadap karyawan atas kinerja dan kontribusi dan berlaku pada tiga aspek yakni pengarahan perilaku, kinerja organisasi dan kekuatan untuk menekan organisasi.

Menurut Inigo *et al* (2012) organisasi dikatakan kuat, jika nilai-nilai organisasi itu disadari, dipahami dan diikuti, serta dilaksanakan oleh sebagian besar para anggota organisasi. Organisasi menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain sebagai identitas bagi anggota-anggota organisasi.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan berbagai referensi dan konsep yang relevan dengan penelitian terdahulu maka disusun sebuah kerangka pikir dan dijelaskan sebagai berikut

**Gambar 2.3 Kerangka Berpikir**



Sumber : Siagian (2010) dan Erniati (2016)

## **2.4 Operasional Konsep**

### **2.4.1 Batasan Lingkup**

Batasan lingkup pada penelitian ini fokus pada penerapan RPB Kabupaten Tana Tidung ini mencakup penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Tana Tidung sebagai dasar sistem disaster manajemen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tana Tidung.

### **2.4.2 Konsep**

Konsep yang dibahas pada penelitian ini dikaitkan dengan Rencana Penanggulangan Bencana Kab Tana Tidung yang ditetapkan apakah sesuai dengan peraturan atau justru sebaliknya. Penilaian evaluasi kinerja kemudian dikaitkan dengan data hasil korban bencana alam pada periode tahun 2017-2018. Evaluasi kinerja ini merupakan salah satu strategi kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah serta menanggulangi bencana daerah yang terjadi. Penelitian ini menguraikan sistem Rencana Penanggulangan Bencana diterapkan melalui pengelolaan disaster manajemen OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung. Dimensi dan indikator pada penelitian ini berkaitan dengan aspek manajemen yakni :

- a. Perencanaan. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat sebagai pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan sebagai usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan untuk memajukan perkembangan organisasi tertentu.
- b. Pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan guna mengefektifkan dan mengefisiensi kerjasama sebab pengorganisasian dapat menilai tingkat

kepentingan dalam setiap aktivitas yang harus dilakukan. Tujuan yang dilakukan akan sangat luas sehingga memerlukan organisasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan organisasi.

- c. **Penggerakan.** Penggerakan merupakan tindakan membuat sumber daya baik sumber daya manusia maupun teknologi melakukan berbagai aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Penggerakan senantiasa diikuti dengan pengerahan tenaga dan memberikan bimbingan kepada sumber daya manusia agar berbagai aktivitas yang dilakukan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

- d. **Pengawasan**

Menurut Siagian (2010:319) pengawasan merupakan segenap kegiatan untuk menyakinkan atau menjamin berbagai pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Proses pengawasan pihak operasional atau pihak pelaksana lapangan harus mengukur target yang hendak dicapai dalam menilai pelaksanaan kerja, mengadakan tindakan perbaikan serta penyesuaian yang dipandang ada penyimpangan.



## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian fokus pada batasan masalah yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah. Pada penelitian kualitatif gejala fenomena permasalahan yang diteliti bersifat holistik (menyeluruh / tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga peneliti kualitatif tidak menerapkan penelitian pada satu variabel penelitian tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2016:207). Hal tersebut terjadi karena proses penelitian kualitatif mengandung ide untuk membuka persepsi murni yang lepas dari *common sense* atau akal sehat, serta terdiri dari kesadaran tentang diri, gambaran mental atau kesan dari sesuatu dan penyusunan makna dari gambaran (Sutrisno & Putranto, 2005:81). Selain itu, eskplorasi memiliki wawasan utama tentang pengertian dan penjelasan dari suatu realitas yang harus dihasilkan dari gejala realitas tersebut (Endraswara, 2006:65).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni data primer berupa hasil wawancara dengan informan dan data sekunder berupa referensi jurnal, buku, artikel, website, laporan kinerja dari BPBD Kab Tana Tidung dan sebagainya. Informan dalam penelitian ini yakni pihak yang berkaitan dan berwenang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tana Tidung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan studi lapangan

melalui wawancara mendalam dan observasi kemudian studi pustaka melalui penelusuran data baik secara offline maupun online dan dokumentasi.

### 3.2 Sumber Informasi

Pada penelitian kualitatif informan yang dituju merupakan pihak yang berhubungan secara langsung sebagai narasumber informasi dengan jumlah tidak dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam rangka menjawab rumusan masalah yang diajukan. Sumber informasi pada penelitian ini adalah informan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tara Tidung yakni

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan
3. Kabid Penanggulangan Bencana
4. Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi
5. LSM Penanggulangan Bencana
6. Tokoh Masyarakat
7. Tokoh Agama
8. Jurnalis
9. Aktivistis Lingkungan
10. Relawan Bencana Alam

### 3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat atau panduan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Pada penelitian ini instrumen penelitian yang

digunakan yakni panduan wawancara berupa kuesioner dalam memperoleh data primer dengan melakukan wawancara mendalam pada para informan (Burhan, 2014:105).

### 3.4 Prosedur Pengambilan Data

Pengumpulan data pada penelitian deskriptif kualitatif tidak berbeda dengan penelitian deskriptif kuantitatif yakni dengan menyiapkan schedule penelitian, penganggaran dan pengumpulan data lapangan (Burhan, 2007:136). Pada penelitian kualitatif tidak memerlukan banyak peneliti sehingga tidak membutuhkan tim penelitian serta tidak membutuhkan uji coba instrumen penelitian yang ketat. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik kualitatif pula dengan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : yakni:

(1) Observasi penelitian. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik yang dilakukan dalam observasi ini adalah dengan kuesioner.

(2) Wawancara mendalam. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi sedetailnya dari unit analisis yang diteliti.

(3) Analisis dokumen. Dokumentasi dimana teknik ini dilakukan dengan cara mencari data dari dokumen perusahaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, gambaran umum objek penelitian tersebut (Burhan, 2007:143).

### 3.5 Metode Analisis Data

Berdasarkan tujuan analisis maka terdapat dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif yakni menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data dan proses suatu fenomena sosial tersebut. Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada di dalam suatu fenomena sosial dan mendeskripsikan kejadian proses sosial tersebut sesuai dengan apa yang tersusun menurut ilmu pengetahuan yang sistematis tentang realitas sosial, proses sosial dan semua atribut yang ada dalam fenomena sosial tersebut. Proses menganalisis makna di dalam fenomena sosial tersebut sehingga terungkap sebuah gambaran emik terhadap sebuah peristiwa sosial yang tampak (Burhan, 2007:161)

Analisis data dibagi menjadi tiga kelompok yakni metode analisis teks dan bahasa, analisis tema-tema budaya serta analisis kinerja dan pengalaman individu serta perilaku institusi. Pada penelitian ini menggunakan analisis kinerja dan pengalaman individu serta perilaku institusi dimana alat yang digunakan untuk menganalisis suatu kinerja dan pengalaman individu serta perilaku institusi adalah dengan melihat output yang dihasilkan dari kinerja tersebut yang dilakukan oleh objek dan informan penelitian serta bagaimana objek dan informan penelitian memaknai output kinerja tersebut (Burhan, 2007:162).

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif (Miles dan Huberman dalam Burhan, 2007:150) dimana langkah pertama yakni reduksi data dilakukan dengan cara data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan

dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. Langkah kedua yakni penyajian data (*display data*) dilakukan dengan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh jawaban dari analisis sehingga diperoleh temuan-temuan permasalahan yang terjadi, sehingga nantinya dapat dirumuskan hasil evaluasi kinerja serta strategi pengembangan yang tepat.

Pada penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan data kualitatif Moleong (Burhan, 2007:265). Jenis triangulasi yang digunakan yakni triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara data yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber penelitian dibandingkan dengan data yang didapatkan dari narasumber lain dengan demikian pengujian data melibatkan berbagai narasumber.



## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Tana Tidung akan disesuaikan tingkat risikonya (*risk*) yang didalamnya terdapat unsur bahaya/ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*Capacity*) daerah berdasarkan hasil pemetaan risiko serta masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusunan RPB ini.

Pelayanan penanganan bencana yang dilaksanakan terhadap kejadian bencana yang sudah terjadi di wilayah Kabupaten Tana Tidung dinilai masih perlu untuk ditingkatkan menjadi lebih cepat, lebih tepat, lebih efektif dan lebih efisien, dalam rangka mendukung dan memberdayakan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Tidung. Secara umum, keberadaan RPB Kabupaten Tana Tidung diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menurunkan risiko bencana di wilayah tersebut. Secara khusus, dengan adanya kebijakan otonomi daerah, RPB akan memiliki peranan yang berbeda bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan peranannya di dalam sistem pemerintahan, pelaksanaan RPB di dalam lingkup internal Kabupaten Tana Tidung terbatas pada fungsi koordinasi, fasilitasi dan motivasi Pemerintah Kabupaten kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan kabupaten Tana Tidung. Sementara bagi pemerintah kabupaten dokumen RPB Kabupaten Tana Tidung dapat digunakan sebagai acuan

penyusunan strategi dan program penanggulangan bencana yang telah disesuaikan dengan kondisi spesifik kabupaten Tana Tidung.

Secara historis di wilayah Kabupaten Tana Tidung telah sering terjadi kejadian bencana yang meliputi:

1. Genangan air/banjir,
2. Gelombang ekstrim yang mengakibatkan angin kencang (puting beliung),
3. Kebakaran bangunan yang terjadi di lingkungan daerah industri dimana lokasi tersebut dekat dengan lokasi permukiman,
4. Kegagalan teknologi dan limbah industri penyebab pencemaran lingkungan.
5. Kekeringan terutama ketersediaan air untuk areal persawahan serta kebutuhan air bersih untuk dikonsumsi masyarakat
6. Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Tana Tidung

Sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2007, penyajian dokumen RPB Kabupaten Tana Tidung ini mencakup penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Tana Tidung pada 3 tahapan, yaitu: Pra Bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi: Dalam situasi tidak terjadi bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: Perencanaan penanggulangan bencana; Pengurangan risiko bencana; Pencegahan; Pemaduan dalam perencanaan pembangunan; Persyaratan analisis risiko bencana; Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; Pendidikan serta pelatihan; dan Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi: Kesiapsiagaan; Peringatan dini; dan Mitigasi bencana.

Saat tanggap darurat dan pemulihan segera (*early recovery*) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya; Penentuan status keadaan darurat bencana; Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; Pemenuhan kebutuhan dasar; Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Pasca Bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tana Tidung pada tahap pasca bencana meliputi: Rehabilitasi; dilakukan melalui kegiatan: Perbaikan lingkungan daerah bencana; Perbaikan prasarana dan sarana umum; Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; Pemulihan sosial psikologis; Pelayanan kesehatan; Rekonsiliasi dan resolusi konflik; Pemulihan sosial ekonomi budaya; Pemulihan keamanan dan ketertiban; Pemulihan fungsi pemerintah; dan Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi; dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi: Pembangunan kembali pra sarana dan sarana; Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan Peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi; Kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

## 4.2 Hasil

### 4.2.1 Sistem Kerja BPBD Kabupaten Tana Tidung

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar-fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Sebagai contoh, dokumen rencana tata ruang menetapkan ruang dengan fungsi perlindungan bencana pada lahan rawan longsor dengan tujuan agar masyarakat dan aktivitas yang mereka kembangkan tidak menjadi korban apabila bencana longsor terjadi. Dalam praktik penyusunan ruang di Indonesia, dokumen tata ruang bersifat hirarkis. Mulai dari dokumen yang bersifat makro yang berlaku pada level nasional hingga dokumen detil yang hanya berlaku pada kawasan tertentu saja. Dokumen tata ruang tersebut adalah:

- *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)*; merupakan dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Dokumen ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level provinsi dan kabupaten/kota.
- *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)*; merupakan penjabaran RTRWN pada masing-masing provinsi. Dokumen ini berlaku pada masing-masing provinsi yang diaturnya, sebagai contoh RTRW Kabupaten Tana Tidunghanya berlaku pada wilayah hukum Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dokumen ini dijabarkan dalam bentuk dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan dokumen detil lainnya.

- *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK)*; merupakan penjabaran dari dokumen RTRWN dan RTRWP pada level kabupaten/kota. Dokumen ini berlaku pada masing-masing wilayah administratif kabupaten/ kota.

(b). RDTR dan RTBL

Rencana Detil Ruang dalam bentuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); merupakan penjabaran detil dari dokumen RTRWK dan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/ kota dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 20/PRT/M/2011 tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota menegaskan bahwa RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/ kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis kota (Bab II, Pasal 3 Ayat 1).

Permen PU tersebut secara jelas menyebutkan bahwa RDTR disusun untuk kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Sehingga, berdasarkan

Permen PU ini, RDTR tidak mencakup wilayah di luar kawasan perkotaan. Hal ini berbeda dengan RDTR sebelum adanya Permen PU ini, dimana wilayah perencanaan meliputi seluruh kawasan kecamatan, selain kawasan perkotaan, sedangkan penataan kawasan yang berada di luar perkotaan, penataan dan pemanfaatannya merujuk kepada RTRW kabupaten di atasnya.

Prinsip dasar dari Permen PU No. 20/PRT/2011 bahwa pemanfaatan dan konflik ruang yang kerap terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan adalah ruang pada kawasan perkotaan. Selain itu, jenis penggunaan ruang di perkotaan juga lebih banyak dan beragam. Sementara penggunaan ruang di luar kawasan perkotaan tidak banyak jenis penggunaannya, sehingga tidak diperlukan perencanaan secara detail.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Tidung, RDTR ini diperlukan karena hampir sebagian besar wilayahnya bersifat padat penduduk, padat bangunan, dan berfungsi sebagai daerah industri maupun pendukung industri. Kondisi ini perlu diketahui dengan benar karena bilamana terjadi bencana, akan mengakibatkan kerugian material dan korban jiwa yang cukup besar. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (7) disebutkan bahwa;

1. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:
  - Rencana umum tata ruang; dan
  - Rencana rinci tata ruang.
2. Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

- Rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
  - Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
3. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
  - Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
  - Rencana detail tata ruang kabupaten/ kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/ kota.
4. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.
5. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila:
6. Rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
7. Rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.
8. Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

#### 4.2.2 Sistem Pengelolaan Bencana BPBD Kab. Tana Tidung

Melalui berbagai tinjauan literatur serta proses wawancara yang telah dilakukan maka diketahui tujuan dari masukan kebijakan pengelolaan bencana ini yakni membantu memberikan masukan pada pemerintah terkait rencana pengelolaan bencana agar ketika dilakukan perubahan pengelolaan bencana maka diharapkan ada perubahan taraf hidup yang terjadi pada masyarakat yang terkena bencana. Masukan kebijakan ini mempertimbangkan berbagai aspek perubahan transformasi tersebut antara lain dapat dilihat dari kondisi ekonomi, sosial serta persepsi masyarakat yang terkena bencana terhadap rencana kondisi perumahan dan fasilitas yang akan dibangun. Berbagai komponen tersebut diuraikan lebih lanjut dalam sejumlah sub bab yang ada dalam pembahasan ini. Dalam hal masukan terkait kebijakan ekonomi antara ditujukan untuk terjadi untuk mengoptimalkan perubahan pendapatan dan perubahan pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi berbagai kebutuhan serta pemilikan aset yang seluruhnya merupakan cerminan bagaimana kondisi perekonomian warga pasca terjadi bencana. Masukan formulasi kebijakan yang disusun berdasarkan hasil wawancara ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka merencanakan proses pengelolaan bencana

Sub bab lain menjelaskan mengenai kebijakan terkait kondisi sosial yang dijelaskan mengenai perubahan yang terjadi dalam kondisi kesehatan, kondisi pendidikan, aktivitas kemasyarakatan dan relasi sosial. Analisis sosial dapat dianalisa dari perubahan yang mungkin terjadi pada kondisi sosial warga yang terkena bencana. Kemudian sub bab masukan kebijakan berdasarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi perencanaan pengelolaan bencana serta perumahan

dijelaskan mengenai tanggapan masyarakat terhadap berbagai kondisi lingkungan yang akan dibangun (rumah, air bersih, listrik, sanitasi, keamanan lingkungan dari banjir, kebakaran dan kriminalitas serta penggunaan fasilitas). Berbagai persepsi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam rangka formulasi kebijakan dalam rangka pengelolaan bencana warga. Hal ini terkait dengan kebijakan penataan pengelolaan bencana, kebijakan terkait kriteria wilayah pengelolaan bencana yang sesuai dengan warga serta kebijakan konsep optimalisasi konsolidasi sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat yang terkena bencana.

Instrumen kebijakan adalah alat kebijakan yang diatur secara aktual untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan. Dalam penelitian ini, instrumen kebijakan difokuskan pada perencanaan instrumen kebijakan yang akan digunakan dalam proses pengelolaan bencana warga. Kondisi lingkungan di Kabupaten Tana Tidung apabila dilihat dari sisi kualitas masih terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan khususnya pada bantaran sungai. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh BLH Kabupaten Tana Tidung. Umumnya, permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung adalah masalah polusi, udara, sampah dan air. Kebijakan pengelolaan bencana ini ditujukan pada 25% jiwa dari keseluruhan desa yang ada di lokasi khususnya untuk warga lokasi di bantaran sungai yang kerap mengalami bencana banjir. Berdasarkan hasil survey pada para penduduk maka diketahui bahwa terdapat berbagai pandangan, syarat, sistem yang diinginkan oleh warga ketika pengelolaan bencana akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Pada umumnya warga bantaran sungai bersedia untuk dikelola

atau direlokasi sebagai pengelolaan bencana. Beberapa masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung antara lain: penurunan kualitas udara ambient, penurunan kualitas air nadan air, penurunan kualitas air laut dan masalah sampah.

“Masalah lingkungan yang memicu bencana biasa terjadi di Kabupaten Tana Tidung antara lain penurunan kualitas udara ambient, penurunan kualitas air nadan air, penurunan kualitas air laut dan masalah sampah sehingga menyebabkan bencana banjir dan kebakaran khususnya di wilayah bantaran sungai”. (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Salah satu pengelolaan bencana yakni pengembalian lokasi lingkungan sesuai dengan fungsi yakni bantaran sungai yang kembali difungsikan sebagai wilayah jalur air bukan sebagai pemukiman penduduk. Pemenuhan kebutuhan pemukiman sebagai salah satu bentuk pengelolaan bencana. Menurut penjelasan UU No.4 tahun 1992 bahwa perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran penting yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan penghidupan masyarakat. Kebijakan perumahan dan pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kehidupan semata namun lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya dan menampakkan jati diri. Kebijakan relokasi pemukiman diharapkan dapat memberikan perubahan pada pemukiman warga bantaran sungai menjadi lebih baik dari pada sebelumnya ketika tinggal di bantaran sungai. Sesuai dengan salah satu petikan wawancara berikut :

“jadi kami memang akan mengadakan relokasi dan ini masih dalam pembahasan mengenai rencana pemindahan, penentuan lokasi dan sebagainya kami masih mempertimbangkan terkait dengan kondisi calon relokasi, fasilitas dan ekonomi masyarakat selanjutnya sebagai bentuk pengelolaan bencana”. (Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Rencana pengembangan pemukiman diketahui terkait kondisi bangunan rumah akan dibuat lebih kokoh dari pemukiman warga sebelumnya, karna rencana dibuat dengan bangunan susun maka lantai dipersempit dengan lebar tidak selebar pemukiman warga sebelumnya. Kondisi ventilasi tentu dibuat lebih baik dari pemukiman sebelumnya.

Kondisi genangan hujan disini memiliki arti bahwa untuk tadah hujan di pemukiman lama dinilai masih minim sehingga lokasi tadah hujan agar pemukiman terhindar dari genangan hujan akan diperbanyak di pemukiman baru, kepadatan bangunan ruang yang tinggi di pemukiman lama akan diperlebar, pembagian ruang di pemukiman lama akan diperlebar jika dibandingkan dengan pemukiman baru dimana kepadatan hunian (perhitungan berdasarkan jumlah penduduk) akan sedikit kurang lebih sama bahkan akan lebih padat sedikit jika dibandingkan pemukiman lama sebab tergantung jumlah kepala keluarga yang tinggal di tiap bangunan yang disediakan. Pengelolaan bencana tidak jauh dari ketersediaan bahan pangan, sandang dan yang terpenting ketersediaan prasarana Ketersediaan prasarana diukur dengan yaitu ketersediaan air terutama untuk konsumsi sehari-hari, sanitasi/air limbah, sampah, drainase/got serta jalan lingkungan.

#### **4.2.3 Sistem Penanggulangan Bencana BPBD Kab Tana Tidung**

##### **4.2.3.1 Kebijakan Perencanaan Relokasi Sisi Sarana**

Ketersediaan sarana permukiman diukur dengan ketersediaan 5 jenis sarana utama yang tersedian, yaitu ketersediaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ruang terbuka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa berbagai sarana ini dibangun pada

saat terjadi bencana agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang terkena bencana menjadi lebih layak dibandingkan kondisi sebelumnya sesuai petikan wawancara berikut:

“kami senantiasa berkoordinasi dengan masyarakat warga yang terkena bencana, seperti apa lokasi baru yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga tetap mempertimbangkan sarana yang hal ini juga berdampak pada aspek sosial, budaya serta agama, sehingga selalu ada perencanaan mengenai gambaran sarana yang akan dibangun” (Kabid Penanggulangan Bencana)

Perencanaan diketahui bahwa lokasi ibadah jumlahnya akan sama dengan pemukiman lama, fasilitas pendidikan akan dipusatkan pada lokasi tertentu khusus untuk sekolah SD, SMP dan SMA dalam satu wilayah sehingga sehingga langsung difokuskan pada satu bangunan. Fasilitas kesehatan juga direncanakan langsung dipusatkan pada satu lokasi dengan berbagai fasilitas untuk keseluruhan warga relokasi yang terdiri dari satu rumah sakit, puskesmas, posyandu dan berbagai fasilitas kesehatan lain. Kegiatan ekonomi juga difokuskan pada lokasi tertentu yang terdiri dari ruko, pasar dan sebagainya sehingga mudah ketika dilakukan penataan kota serta pembangunan. Semua kegiatan ekonomi para pedagang dan yang memiliki usaha tidak lagi berjualan di rumah mereka namun diarahkan pada lokasi yang sesuai. Hasil dari terpusatnya lokasi pendidikan pada wilayah tertentu, kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu dan fasilitas kesehatan pada wilayah tertentu maka lokasi khusus daerah pemukiman dapat dibangun ruang terbuka untuk sarana bermain di sore hari maupun ketika liburan akhir pekan sehingga warga dapat berkegiatan yang berhubungan dengan hobi dan sebagainya.

#### 4.2.3.2 Kebijakan Perencanaan Relokasi Sisi Status Penduduk

Kerentanan status penduduk diukur melalui 5 aspek yang menggambarkan kerentanan status lahan dan rumah, status/asal penduduk, pekerjaan dan pendapatan. Menurut hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan diketahui bahwa terdapat berbagai macam status penduduk dari berbagai latar belakang pekerjaan, usia dan status lahan yang ditempati di bantaran sungai.

“kami telah sosialisasikan kepada masyarakat yang pada prinsipnya menyetujui dan mendukung adanya relokasi asalkan berbagai faktor yang menjadi salah satu kendala seperti status lahan, pekerjaan dan pendapatan penduduk warga yang direlokasi menjadi pertimbangan” (Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan)

Hasil data survey yang diperoleh menunjukkan bahwa pada awal relokasi atau pemukiman status lahan yang diberikan, sebagian masih dimiliki oleh pemerintah, kemudian status bangunan akan diserahkan pada warga, data mengenai asal penduduk diketahui sama dengan warga di pemukiman lama, terkait pekerjaan diketahui bahwa terdapat kemungkinan perubahan pekerjaan ketika dipindah ke lokasi baru yakni beberapa nelayan berpindah pekerjaan menjadi pedagang maupun karyawan. Berdasarkan segi pendapatan pada awal relokasi diketahui pasti akan mengalami penurunan sebagai bentuk penyesuaian namun dibantu dengan adanya uang saku pemerintah sebagai modal awal untuk bertahan.

Salah satu hal penting yang akan dibangun pada relokasi baru yakni penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bahwa penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan bersih, dalam masalah

sarana air bersih dan jaringan listrik di tempat relokasi harus memenuhi persyaratan. Masyarakat mengambil air bersih dari tempat terjangkau. Selain itu, sarana pendidikan dan kesehatan juga harus tersedia. Sehingga pelajar masih tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh untuk mencapai sekolah. Pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan juga harus terjamin. Banyak masyarakat yang pendapatannya diharapkan meningkat seiring pengeluaran semakin bertambah. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk dicarikan solusinya. Misalnya dengan memberdayakan masyarakat atau mendaftar potensi masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk menjadikan relokasi permukiman warga lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan permukiman baru untuk masyarakat bantaran sungai harus sesuai dengan kaidah-kaidah permukiman.

#### **4.2.3.3 Kebijakan Penentuan Kriteria Wilayah Yang Sesuai Pemukiman**

Pemerintah membuat rancangan terkait kebijakan yakni aspek sosial, fisik, ekonomi dan budaya mengenai tempat lokasi baru yang akan dijadikan wilayah relokasi warga bencana. Persyaratan ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan, survey dan koordinasi yang dilakukan.

“kami sudah sosialisasi pada warga mengenai rencana relokasi, kami membantu pemerintah untuk menampung aspirasi dari warga tentang lokasi relokasi baru yang diinginkan seperti apa, sebab warga yang paling mengetahui apa yang mereka butuhkan dan kami yang menyampaikan pada pemerintah” (Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi)

Masukan kebijakan berikutnya yakni terkait aspek fisik dalam penelitian ini adalah kondisi perumahan. Perumahan dalam arti luas meliputi rumah dan segala fasilitas pendukungnya yang bersama merupakan suatu lingkungan perumahan. Fasilitas lingkungan perumahan mencakup aneka ragam, antara lain penyediaan air minum, jaringan saluran pembuangan, jalan lingkungan dan sebagainya yang

kesemuanya penting bagi pemeliharaan lingkungan. Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai persepsi masyarakat terhadap kondisi perumahan yang diantaranya kondisi rumah, air bersih, listrik dan sanitasi; kondisi jalan angkutan umum; keamanan lingkungan dari banjir, kebakaran dan kriminalitas serta; penggunaan fasilitas yang tersedia di wilayah studi.

Kebijakan dalam penyusunan rumah relokasi ini diharapkan lebih baik sebab pembangunan rumah relokasi yang kemungkinan yang dilakukan secara serentak sehingga kurang mendapatkan pengawasan dari pihak pimpinan, akibatnya masyarakat khawatir terdapat beberapa rumah yang masih harus direnovasi ulang oleh para penghuninya.

Kondisi berikutnya yang dijadikan kriteria yakni kondisi air bersih dimana diharapkan lebih baik untuk akses air bersih di lokasi baru dibandingkan di bantaran sungai di mana persepsi ini muncul karena mereka bersedia menempuh jarak 4 km untuk mendapatkan air bersih. Menurut masyarakat sebelum adanya jaringan air mereka harus mengambil air bersih dari sungai yang ada lalu di bawa ke rumah, tetapi saat ini menurut mereka jauh lebih baik. Masyarakat berpendapat bahwa kondisi air bersih tidak baik di mana persepsi ini muncul karena menurut mereka untuk mendapatkan air bersih mereka harus berjalan jauh 4 km yang membuat mereka segan. Bencana banjir akibat tinggal di bantaran sungai tersebut membuat sumber air bersih yang sudah ada sebelumnya menjadi berkurang. Menurut masyarakat sebelum bencana terjadi mereka dapat dengan mudah memperoleh air bersih meskipun jarak tempuh untuk mengambil air tersebut tidaklah dekat. Jaringan air yang ada pada tempat relokasi permukiman diharapkan tidak seperti sebelumnya.

Kondisi listrik juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan sebab mereka menganggap kondisi penerangan di lokasi bantaran sungaicukup baik sehingga dibandingkan saat mereka menetap di bantaran sungai dimana persepsi ini muncul karena meskipun tidak tersedia jaringan listrik mereka bersedia mengadakan penerangan sendiri dengan menggunakan petromak dan lampu tempel. Menurut beberapa masyarakat jaringan listrik yang tersedia sekarang dapat merata, sehingga setiap rumah terdapat jaringan listrik sendiri karena menurut mereka di bantaran sungai sudah ada jaringan listrik sedangkan saat ini diharapkan di permukiman terdapat jaringan listrik dengan penerangan yang lebih baik dan stabil.

Kondisi permukiman yang baik tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik semata, tetapi salah satunya juga dari keamanan lingkungan yang terdapat di permukiman tersebut. Keamanan yang diutarakan dalam penelitian ini adalah keamanan lingkungan dari bahaya banjir, kebakaran dan kriminalitas. Ketenangan dan kenyamanan warga yang hidup di dalamnya sangat bergantung pada tingkat keamanan ketiga hal tersebut. Barang-barang kepemilikan warga akan aman bila lingkungan tersebut terhindar dari bahaya banjir, kebakaran dan kriminalitas. Hal ini bisa dimaklumi karena kondisi area studi terletak di dataran renbah dan rawan banjir sehingga mereka bersepakat bulat untuk memilih perumahan yang lebih baik. Dengan kondisi area yang berada di tempat yang lebih rendahmasyarakat merasa keamanan tempat tinggal yang sekarang dekat dengan ancaman bencana banjir susulan atau banjir yang akan datang. Keadaan ini membuat masyarakat merasa kurang nyaman untuk tinggal dan merasa was-was atau khawatir jika ada bencana banjir lagi. Kondisi kebakaran yang pernah dialami ketika bermukim saat

ini sebanyak 35% menyatakan buruk dan 19% menyatakan sangat baik. Maksudnya mereka pernah mengalami kebakaran ketika mereka bermukim di bantaran sungai. Hal ini bisa dimaklumi karena kondisi perumahan saat ini merupakan kayu dan mempunyai jarak antar rumah yang kurang aman dari bahaya kebakaran sehingga mereka bersepakat bulat membutuhkan kondisi perumahan yang lebih baik. Tidak adanya jarak antar rumah tersebut dapat membuat api yang menjalar ketika ada kebakaran dimana dapat secara langsung dapat merembet ke rumah yang lainnya. Sehingga jika terjadi kebakaran masyarakat sekitar kebakaran tersebut maka akan terjadi kesulitan mengantisipasi terlebih dahulu ketika merembet ke rumah mereka. Dari hasil survey yang dilakukan mengenai kriminalitas yang pernah dialami ketika bermukim saat sebanyak 17% menyatakan buruk dan 19% menyatakan sangat buruk karena mereka pernah mengalami tindakan kriminalitas ketika bermukim di bantaran sungai. Tindak kriminal menurut beberapa masyarakat mungkin dikarenakan orang yang melakukan tindak kriminal tersebut juga ikut mengalami musibah bencana banjir, sehingga mungkin untuk sementara kriminalitas meningkat ketika adanya bencana banjir. Hal ini disebabkan barang mereka pernah kecurian padahal sewaktu di bantaran sungai. Kriminalitas yang terjadi pasca bencana tersebut masih tetap ada meskipun tidak sesering dan sebesar sebelum bencana banjir. Dari hasil survey yang dilakukan mengenai senang atau tidak senang bermukim di wilayah studi masyarakat yang menyatakan kurang senang tinggal di wilayah studi ada sebanyak 19 orang dan 21% yang menyatakan tidak senang, persepsi ini muncul karena menurut responden kondisi saat ini serba kesulitan misalnya akses fasilitas rumah, dan keamanan dari bencana banjir. Masyarakat

menyatakan bahwa keadaan saat ini merasa tidak senang sebab jauh dengan kerabat dekat yang dulu rumahnya berdekatan.

Ketersediaan fasilitas, lengkap tidaknya fasilitas yang ada dapat mencerminkan perkembangan keadaan masyarakat di lokasi yang bersangkutan. Pada umumnya makin berkembang suatu masyarakat makin lengkap fasilitas sosial-ekonomi yang dimilikinya, sesuai dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan. Kemudahan hubungan dan komunikasi, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan faktor kelengkapan fasilitas. Karena kemudahan hubungan dan komunikasi akan berjalan dengan baik seiring dengan kelengkapan fasilitas seperti jaringan utilitas dan jalan yang makin baik, serta tidak lupa pula sarana pendidikan, kesehatan, dan perbelanjaan. Akan sangat membantu penghuni permukiman tersebut guna keberlangsungan hidup mereka. Sesuai anggaran dana di dalam pembangunan relokasi permukiman maka oleh Pemerintahan Tana Tidung membangun fasilitas Peribadatan yakni masjid dan gereja. Pembangunan Masjid dan Gereja ini didasari oleh mayoritas penghuni relokasi permukiman pada beberapa desa di Bantaran Sungai. Di dalam mengatasi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, penduduk relokasi permukiman menggunakan fasilitas di pusat kota.

Kabupaten Tana Tidung khususnya pada lokasi yang rawan bencana seperti bantaran sungai masih tertinggal dalam pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Artinya jalan untuk menuju sasaran ideal yang berupa pembangunan manusia seutuhnya yang ditandai dengan kualitas sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak,

serta meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Tana Tidung untuk bisa segera terwujud masih membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih serius.

Kesejahteraan pada dasarnya memiliki dimensi yang luas dan beragam. Salah satu indikator yang dapat merepresentasikan hal ini melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Aspek penting dalam pembangunan daerah yang meliputi (1) Aspek Geografis dan Demografis; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Pelayanan Umum; (4) Aspek Daya Saing Daerah, pada dasarnya diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia itu sendiri, sebagai tujuan bagi pembangunan daerah. Dari keempat aspek tersebut, diarahkan untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melakukan pengelolaan yang lebih sistematis dan terarah agar dapat sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada, serta dikelola dalam rangka keharmonisan lingkungan. Seluruh aspek tersebut bersinergi dalam mewujudkan peningkatan IPM sebagai tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kehidupan sebuah rumah tangga di suatu lingkungan permukiman tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan terhadap tuntutan ekonomi mereka. Karena tanpa adanya kondisi-kondisi sosial yang menunjang seperti kondisi kesehatan, pendidikan dan relasi sosial yang dimiliki suatu rumah tangga, maka kegiatan rumah tangga untuk memenuhi tuntutan ekonomi juga akan mengalami gangguan. Tanpa adanya kondisi kesehatan yang baik seseorang tidak beraktivitas secara optimal, begitu pula halnya dengan kondisi pendidikan yang merupakan modal utama dalam membentuk kemampuan manusia, dan relasi sosial yang dimiliki suatu rumah tangga akan menunjang kehidupan mereka di

suatu lingkungan. Rumah tidak hanya menjadi kebutuhan individual melainkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seseorang yang telah terpenuhi kebutuhan akan rumah tidak berdiri sendiri, melainkan hadir bersama-sama dengan orang lain yaitu masyarakat lingkungannya. Karena orang tidak mungkin hidup sendirian, maka kehadirannya ke dalam suatu rumah mau tidak mau dipengaruhi oleh masyarakat lingkungan sekelilingnya.

Perubahan pada kondisi perekonomian rumah tangga adalah salah satu determinan penting dalam menjelaskan perubahan taraf hidup rumah tangga yang direlokasi. Dengan segala faktor-faktor yang menjadi nilai lebih maupun nilai kurang dari suatu lokasi permukiman, seseorang maupun suatu rumah tangga tentu membutuhkan dukungan perekonomian yang kuat untuk dapat menyesuaikan diri pada suatu permukiman. Ketika suatu rumah tangga diharuskan untuk meninggalkan lingkungan permukiman yang sudah ada menuju suatu lingkungan yang baru, maka kondisi perekonomian yang sudah stabil tersebut akan dipaksa untuk kembali menyesuaikan diri lagi terhadap kondisi yang baru tersebut. Hal tersebut menyebabkan beberapa perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian rumah tangga akibat relokasi permukiman.

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pendapatan rumah tangga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan rumah tangga. Pada tingkat pendapatan rumah tangga yang sangat rendah maka pengeluaran rumah tangga adalah lebih besar dari pendapatannya. Ini berarti bahwa pengeluaran konsumsi bukan saja dibiayai oleh pendapatannya tetapi juga dari sumber-sumber lain, seperti tabungan yang dibuat di masa lalu, dengan menjual harta kekayaannya, atau dari meminjam. Pada suatu tingkat

pendapatan rumah tangga yang cukup tinggi, konsumsi rumah tangga akan sama besarnya dengan pendapatan rumah tangganya. Apabila pendapatan rumah tangga mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi, maka rumah tangga tidak akan menggunakan seluruh pendapatan yang dapat dibelanjakan tersebut. Ini berarti pengeluaran rumah tangga adalah lebih rendah dari pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang tidak digunakan untuk belanja tersebut merupakan tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga.

Pengeluaran suatu rumah tangga akan menunjukkan tingkat konsumsinya, Aktivitas konsumsi dapat digambarkan sebagai pemuasan dari keinginan dan kebutuhan materi melalui penyediaan barang-barang seperti makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lainnya. Aktivitas konsumsi secara umum tidak diharapkan sebagai suatu kontribusi terhadap sumber daya keuangan atau fisik suatu rumah tangga, terkecuali konsumsi untuk barang tertentu yang tahan lama bagi penggunaan di masa akandatang.

Kepemilikan aset merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kondisi perekonomian suatu rumah tangga. Karena dengan bertambahnya aset suatu rumah tangga dapat menunjukkan bahwa tingkat konsumsinya juga mengalami peningkatan. Bahkan kepemilikan aset dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk investasi yang dilakukan suatu rumah tangga, dimana investasi dalam bentuk ini dapat bermanfaat bagi suatu rumah tangga bila mereka sedang sangat membutuhkan dana yang mendesak.

### 4.3 Pembahasan

Berbagai usulan kebijakan yang diutarakan dalam penelitian ini dalam rangka penanggulangan warga bencana tersebut disesuaikan dengan indikasi rencana program prioritas Kabupaten Tana Tidung berisi program-program prioritas, khususnya program prioritas Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah khususnya pada warga yang terkena bencana. Adapun indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan dana program prioritas. Sistem kerja, sistem pengelolaan dan sistem penanggulangan masuk dalam proses disaster manajemen.

Berdasarkan teori Disaster Manajemen sebagai salah satu proses pengelolaan terhadap adanya potensi serta resiko bencana. Pengkajian dan penilaian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya (*hazard*), tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan tingkat kapasitas, berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi Kabupaten Tana Tidung untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Dari hasil analisa tersebut dapat dihasilkan indeks risiko bencana yang disusun berdasarkan komponen bahaya, kerugian dan kapasitas kemudian dalam tahap selanjutnya dapat dipetakan dalam format digital untuk ditampilkan pemetaan indeks risiko bencana tiap kecamatan.

Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter

sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas, regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. Pada tatanan pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan ini nantinya merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.

Pada tatanan mitra pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana. Pendampingan dan intervensi para mitra harus dilaksanakan dengan berkoordinasi dan tersinkronasi terlebih dahulu dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada tatanan masyarakat umum, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai salahsatu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal. Hasil dari penerapan teori tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pembangunan daerah penanggulangan pasca bencana maupun relokasi maupun meliputi 16 pogram unggulan, yakni: (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; (2) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (4) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; (5) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; (6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Pengairan Lainnya; (7) Pengadaan Jaringan SUTM, SUTR dan TRAFODistribusi

Untuk Melayani Pemasangan Baru; (8) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 75 Unit; (9) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Listrik Berupa Pengadaan Mesin Genset 1000 KVA; (10) Peningkatan Sistem Kesehatan Puskesmas & Rumah Sakit; (11) Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak; (12) Pengendalian Penyakit & Pengembangan Lingkungan Sehat; (13) Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan; (14) Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan (Sekolah Unggulan, Unit Sekolah Baru Dan Ruang Kelas Baru, Lembaga PAUD, Kualitas Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Pendidik); (15) Peningkatan Pariwisata Dan Kebudayaan Daerah (Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengelolaan Keragaman Budaya); (16) Pengembangan Agroindustri (Pengadaan Sarana & Prasarana Teknologi Pertanian, Pelatihan dan Pendampingan Pertanian, Jaringan Irigasi Dan Cetak Sawah, Swasembada Pangan).

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan urusan pemerintah dan dalam penyusunan Rencana Strategis dalam optimalisasi adanya berbagai aspek sosial, ekonomi dan budaya agar warga relokasi tidak kehilangan adat istiadat, warisan budaya serta kenyamanan beribadah serta bekerja termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung secara terperinci dalam rangka optimalisasi penyesuaian warga bencana di tempat baru dari lokasi sebelumnya.

Mengacu pada hasil identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung yang diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat dinyatakan isu-isu

strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang mendukung optimalisasi konsolidasi sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat bencana sehingga masyarakat tidak merasa kehilangan ataupun kurang diperhatikan sebab pemerintah tidak hanya memberikan dukungan yang bersifat fisik namun juga non fisik sebagai berikut:

(1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia warga bencana meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas guru sesuai kompetensi.
- b. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Pengalokasian anggaran untuk mendukung proses belajar-mengajar pada sekolah-sekolah unggulan.
- d. Penerapan kebijakan bebas biaya pendidikan 12 tahun.
- e. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi tetapi orang tuanya tidak mampu.
- f. Regulasi tentang Sistem Pelatihan Kerja di Daerah.
- g. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Swasta untuk penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di wilayah relokasi yang baru, meliputi:

- a. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.
- b. Kebijakan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan pada kegiatan pemrosesan (industrialisasi).
- c. Investasi, penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah.

- d. Regulasi (Peraturan Daerah) tentang CSR.
  - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR (terbentuknya forum CSR).
  - f. Kemitraan antara pemerintah dan swasta (kerjasama pemerintah swasta).
  - g. Peran serta Perusda dalam pengelolaan sumber daya alam.
  - h. Kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
  - i. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global.
  - j. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
  - k. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bencana yang baru, meliputi:
- a. Pengembangan kelembagaan kegiatan ekonomi ditingkat desa.
  - b. Pengembangan dan pembangunan usaha-usaha ekonomi alternatif dan kreatif di pedesaan.
  - c. Pembukaan lapangan kerja melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).
  - d. Pengadaan Tenaga Pendamping Pedesaan.
  - e. Proyek padat karya.
  - f. Penyediaan sarana transportasi (subsidi transportasi) pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
  - g. Fasilitasi peningkatan pendapatan yang layak sesuai UMK/UMP.
- (4) Pengembangan Budaya dan Pariwisata berbasis kearifan lokal, meliputi:
- a. Kebijakan yang meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap budaya dan kearifan lokal.
  - b. Pembentukan dan fungsi balai-balai budaya.
  - c. Promosi dan pementasan budaya lokal di dalam dan luar negeri.

- d. Dokumentasi karya dan pementasan budaya lokal.
  - e. Peran pimpinan/pemangku adat dalam dalam pengambilan kebijakan pembangunan budaya dan pariwisata.
  - f. Peran pimpinan/pemangku adat dalam memelihara dan melindungi budaya lokal.
  - g. Karakterisasi dan identifikasi budaya lokal dan keanekaragaman hayaticiri khas Tana Tidung.
  - h. Pengusulan hak kekayaan intelektual (Paten, Hak Cipta, Indikasi Geografis, perlindungan varietas tanaman, desain lokal, warisan budaya) yang terkait dengan kebudayaan dan kearifan lokal.
- (5) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang ada di wilayah relokasi yang baru, meliputi:
- a. Aksesibilitas wilayah-wilayah terisolir sesuai konsep pembangunan wilayah berorientasi transportasi (*Transit oriented development/TOD*), dengan prioritas realisasi prasarana: jalan, jembatan, pelabuhan, rel kereta, dll dengan melibatkan peran serta swasta.
  - b. Ketersediaan sarana prasarana pemerintahan.
  - c. Jaminan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan air bersih dan prasarana kesehatan lingkungan lainnya (sampah, mck, dll).
  - d. Jaminan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan akses mendapatkan BBM dan BBG.
  - e. Jaminan ketersediaan dan pengelolaan pasar tradisional yang mampu menghadapi persaingan atau bersinergi dengan pasar modern.

- f. Jaminan ketersediaan dan pengelolaan profesional jaringan *Information Communication Tecknology* (ICT).
  - g. Jaminan ketersediaan dan pendayagunaan ruang terbuka hijau (minimal 30% sesuai undang-undang RTH);
  - h. Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTG dan PLTA) untuk ketersediaan energi listrik.
  - i. Kapasitas jaringan kelistrikan.
  - j. Penyediaan dan pelengkapan sarana mitigasi dan penanggulangan bencana.
  - k. Penyediaan sarana rekreasi, taman bermain, dan sarana olah raga.
- (6) Pembukaan Lapangan Kerja di Wilayah Baru, meliputi:
- a. Kebijakan strategis dalam peningkatan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (sertifikasi keahlian).
  - b. Implementasi kebijakan strategis peningkatan daya saing tenaga kerja lokal berbasis kompetensi (sertifikasi keahlian).
  - c. Penerimaan tenaga kerja lokal dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (Pegawai Pemerintah), Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta.
  - d. Asistensi penyiapan tenaga kerja lokal dalam seleksi penerimaan tenaga kerja.
  - e. Pelatihan kerja dan pendampingan serta penempatan tenaga kerja terampil dan kreatif.
- (7) Meningkatkan keunggulan daerah khususnya pada warga relokasi, meliputi:

- a. Proses belajar mengajar pada sekolah unggulan.
  - b. Jumlah guru kompeten dan fasilitas sekolah unggulan.
  - c. Ketersediaan pusat/balai latihan kerja berbasis kompetensi.
  - d. Daya saing produk-produk unggulan lokal
  - e. Kehadiran industri pengolahan berbasis potensi unggulan lokal.
- (8) Meningkatkan Pelayanan Publik di wilayah Relokasi, meliputi:
- a. Reformasi birokrasi.
  - b. Penataan kelembagaan .
  - c. Kebijakan strategis untuk penyiapan dokter, dokter spesialis dan tenaga medis, termasuk dengan sistem kontrak.
  - d. Penerapan kartu sehat bagi seluruh masyarakat tana tidung yang diselaraskan dengan program BPJS.
  - e. Peningkatan anggaran kesehatan masyarakat.
  - f. Penambahan kapasitas Puskesmas di masing-masing kecamatan.
  - g. Sistem pelayanan administrasi berbasis Informasi dan teknologi komunikasi.
  - h. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis elektronik.
  - i. Pembangunan fasilitas olah raga sosial dan budaya.
  - j. Fasilitasi ketersediaan BBM dan BBG.
  - k. Pemenuhan kebutuhan energi listrik.
- (9) Meningkatkan Jaminan Keamanan Pada Wilayah Relokasi, meliputi:
- a. Kebijakan jaminan keamanan dengan berbagai pendekatan, baik yang bersifat persuasif maupun pencegahan dan penanggulangan melalui penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tanpa pandang bulu;

b. Kerjasama TNI dan Polri untuk pengamanan Jalur laut dan darat.

(10) Menyelesaikan Batas Wilayah;

Prioritas penyelesaian masalah wilayah perbatasan dengan cara dan upaya yang sesuai kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(11) Mengupayakan Kemandirian Pangan;

a. Pencetakan sawah baru dan penyediaan sarana produksi pendukung.

b. Intensifikasi Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultura.

c. Penyediaan tenaga penyuluh (pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan).

d. Sarana prasarana pengairan/irigasi/embung pertanian.

e. Penguatan permodalan dan kelembagaan petani.

f. Pengembangan komoditas perkebunan unggulan.

g. Pengembangan usaha ternak rakyat (ternak kecil dan unggas);

h. Fasilitasi tersedianya sarana produksi peternakan (pengadaan bibit ternak, pupuk, pakan tambahan, obat-obatan serta alat dan mesin peternakan (alsinter).

i. Pengembangan budi daya perikanan darat (kolam ikan), dan sungai (keramba).

Adapun indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan dana program prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan. Pembangunan daerah meliputi 16 program unggulan, yakni: (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; (2) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (4) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; (5) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; (6) Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Pengairan Lainnya; (7) Pengadaan Jaringan SUTM, SUTR dan TRAFODistribusi Untuk Melayani Pemasangan Baru; (8) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 75 Unit; (9) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Listrik Berupa Pengadaan Mesin Genset 1000 KVA; (10) Peningkatan Sistem Kesehatan Puskesmas &Rumah Sakit; (11) Peningkatan Kesehatan Ibu &Anak; (12) Pengendalian Penyakit &Pengembangan Lingkungan Sehat; (13) Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan; (14) Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan (Sekolah Unggulan, Unit Sekolah Baru Dan Ruang Kelas Baru, Lembaga PAUD, Kualitas Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Pendidik); (15) Peningkatan Pariwisata Dan Kebudayaan Daerah (Pengembangan Destinasi Pariwisata,Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengelolaan Keragaman Budaya); (16) Pengembangan Agroindustri (Pengadaan Sarana & Prasarana Teknologi Pertanian, Pelatihan dan Pendampingan Pertanian, Jaringan Irigasi Dan Cetak Sawah, Swasembada Pangan). Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah bagi warga relokasi dan dalam penyusunan Rencana Strategis termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan pada para warga bencana.

Secara ringkas dari keseluruhan penelitian dapat dijelaskan bahwa mengenai kebijakan terkait kondisi sosial yang dijelaskan mengenai perubahan yang terjadi dalam kondisi kesehatan, kondisi pendidikan, aktivitas kemasyarakatan dan relasi sosial. Analisis sosial dapat dianalisa dari perubahan yang mungkin terjadi pada kondisi sosial warga yang terkena bencana. Kemudian sub bab masukkan

kebijakan berdasarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi perencanaan pengelolaan bencana serta perumahan dijelaskan mengenai tanggapan masyarakat terhadap berbagai kondisi lingkungan yang akan dibangun (rumah, air bersih, listrik, sanitasi, keamanan lingkungan dari banjir, kebakaran dan kriminalitas serta penggunaan fasilitas). Berbagai persepsi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam rangka formulasi kebijakan dalam rangka pengelolaan bencana warga. Hal ini terkait dengan kebijakan penataan pengelolaan bencana, kebijakan terkait kriteria wilayah pengelolaan bencana yang sesuai dengan warga serta kebijakan konsep optimalisasi konsolidasi sosial, budaya dan ekonomibagi masyarakat yang terkena bencana.

Instrumen kebijakan adalah alat kebijakan yang diatur secara aktual untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan. Dalam penelitian ini, instrumen kebijakan difokuskan pada perencanaan instrumen kebijakan yang akan digunakan dalam proses pengelolaan bencana warga. Kondisi lingkungan di Kabupaten Tana Tidung apabila dilihat dari sisi kualitas masih terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan khususnya pada bantaran sungai. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh BLH Kabupaten Tana Tidung. Umumnya, permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung adalah masalah polusi, udara, sampah dan air. Kebijakan pengelolaan bencana ini ditujukan pada 25% jiwa dari keseluruhan desa yang ada di lokasi khususnya untuk warga lokasi di bantaran sungai yang kerap mengalami bencana banjir. Berdasarkan hasil survey pada para penduduk maka diketahui bahwa terdapat berbagai pandangan, syarat, sistem yang diinginkan oleh warga ketika pengelolaan bencana akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai

aspek yang ada. Pada umumnya warga bantaran sungai bersedia untuk dikelola atau direlokasi sebagai pengelolaan bencana. Beberapa masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung antara lain: penurunan kualitas udara ambient, penurunan kualitas air nadan air, penurunan kualitas air laut dan masalah sampah.

“Masalah lingkungan yang memicu bencana biasa terjadi di Kabupaten Tana Tidung antara lain penurunan kualitas udara ambient, penurunan kualitas air nadan air, penurunan kualitas air laut dan masalah sampah sehingga menyebabkan bencana banjir dan kebakaran khususnya di wilayah bantaran sungai”. (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Salah satu pengelolaan bencana yakni pengembalian lokasi lingkungan sesuai dengan fungsi yakni bantaran sungai yang kembali difungsikan sebagai wilayah jalur air bukan sebagai pemukiman penduduk. Pemenuhan kebutuhan pemukiman sebagai salah satu bentuk pengelolaan bencana. Menurut penjelasan UU No.4 tahun 1992 bahwa perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran penting yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan penghidupan masyarakat. Kebijakan perumahan dan pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kehidupan semata namun lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya dan menampakkan jati diri. Kebijakan relokasi pemukiman diharapkan dapat memberikan perubahan pada pemukiman warga bantaran sungai menjadi lebih baik dari pada sebelumnya ketika tinggal di bantaran sungai. Sesuai dengan salah satu petikan wawancara berikut :

“jadi kami memang akan mengadakan relokasi dan ini masih dalam pembahasan mengenai rencana pemindahan, penentuan lokasi dan sebagainya kami masih mempertimbangkan terkait dengan kondisi calon relokasi, fasilitas dan ekonomi

masyarakat selanjutnya sebagai bentuk pengelolaan bencana". (Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi)

Rencana pengembangan pemukiman diketahui terkait kondisi bangunan rumah akan dibuat lebih kokoh dari pemukiman warga sebelumnya, karna rencana dibuat dengan bangunan susun maka lantai dipersempit dengan lebar tidak selebar pemukiman warga sebelumnya. Kondisi ventilasi tentu dibuat lebih baik dari pemukiman sebelumnya.

Kondisi genangan hujan disini memiliki arti bahwa untuk tadah hujan di pemukiman lama dinilai masih minim sehingga lokasi tadah hujan agar pemukiman terhindar dari genangan hujan akan diperbanyak di pemukiman baru, kepadatan bangunan ruang yang tinggi di pemukiman lama akan diperlebar, pembagian ruang di pemukiman lama akan diperlebar jika dibandingkan dengan pemukiman baru dimana kepadatan hunian (perhitungan berdasarkan jumlah penduduk) akan sedikit kurang lebih sama bahkan akan lebih padat sedikit jika dibandingkan pemukiman lama sebab tergantung jumlah kepala keluarga yang tinggal di tiap bangunan yang disediakan. Pengelolaan bencana tidak jauh dari ketersediaan bahan pangan, sandang dan yang terpenting ketersediaan prasarana. Ketersediaan prasarana diukur dengan yaitu ketersediaan air terutama untuk konsumsi sehari-hari, sanitasi/air limbah, sampah, drainase/got serta jalan lingkungan.

Perencanaan diketahui bahwa lokasi ibadah jumlahnya akan sama dengan pemukiman lama, fasilitas pendidikan akan dipusatkan pada lokasi tertentu khusus untuk sekolah SD, SMP dan SMA dalam satu wilayah sehingga sehingga langsung difokuskan pada satu bangunan. Fasilitas kesehatan juga direncanakan langsung dipusatkan pada satu lokasi dengan berbagai fasilitas untuk keseluruhan

warga relokasi yang terdiri dari satu rumah sakit, puskesmas, posyandu dan berbagai fasilitas kesehatan lain. Kegiatan ekonomi juga difokuskan pada lokasi tertentu yang terdiri dari ruko, pasar dan sebagainya sehingga mudah ketika dilakukan penataan kota serta pembangunan. Semua kegiatan ekonomi para pedagang dan yang memiliki usaha tidak lagi berjualan di rumah mereka namun diarahkan pada lokasi yang sesuai. Hasil dari terpusatnya lokasi pendidikan pada wilayah tertentu, kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu dan fasilitas kesehatan pada wilayah tertentu maka lokasi khusus daerah pemukiman dapat dibangun ruang terbuka untuk sarana bermain di sore hari maupun ketika liburan akhir pekan sehingga warga dapat berkegiatan yang berhubungan dengan hobi dan sebagainya.

awal relokasi atau pemukiman status lahan yang diberikan, sebagian masih dimiliki oleh pemerintah, kemudian status bangunan akan diserahkan pada warga, data mengenai asal penduduk diketahui sama dengan warga di pemukiman lama, terkait pekerjaan diketahui bahwa terdapat kemungkinan perubahan pekerjaan ketika dipindah ke lokasi baru yakni beberapa nelayan berpindah pekerjaan menjadi pedagang maupun karyawan. Berdasarkan segi pendapatan pada awal relokasi diketahui pasti akan mengalami penurunan sebagai bentuk penyesuaian namun dibantu dengan adanya uang saku pemerintah sebagai modal awal untuk bertahan.

Salah satu hal penting yang akan dibangun pada relokasi baru yakni penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bahwa penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan bersih, dalam masalah

sarana air bersih dan jaringan listrik di tempat relokasi harus memenuhi persyaratan. Masyarakat mengambil air bersih dari tempat terjangkau. Selain itu, sarana pendidikan dan kesehatan juga harus tersedia. Sehingga pelajar masih tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh untuk mencapai sekolah. Pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan juga harus terjamin. Banyak masyarakat yang pendapatannya diharapkan meningkat seiring pengeluaran semakin bertambah. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk dicarikan solusinya. Misalnya dengan memberdayakan masyarakat atau mendaftar potensi masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk menjadikan relokasi permukiman warga lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan permukiman baru untuk masyarakat bantaran sungai harus sesuai dengan kaidah-kaidah permukiman.

Masukan kebijakan berikutnya yakni terkait aspek fisik dalam penelitian ini adalah kondisi perumahan. Perumahan dalam arti luas meliputi rumah dan segala fasilitas pendukungnya yang bersama merupakan suatu lingkungan perumahan. Fasilitas lingkungan perumahan mencakup aneka ragam, antara lain penyediaan air minum, jaringan saluran pembuangan, jalan lingkungan dan sebagainya yang kesemuanya penting bagi pemeliharaan lingkungan. Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai persepsi masyarakat terhadap kondisi perumahan yang diantaranya kondisi rumah, air bersih, listrik dan sanitasi; kondisi jalan angkutan umum; keamanan lingkungan dari banjir, kebakaran dan kriminalitas serta; penggunaan fasilitas yang tersedia di wilayah studi.

Kebijakan dalam penyusunan rumah relokasi ini diharapkan lebih baik sebab pembangunan rumah relokasi yang kemungkinan yang dilakukan secara serentak sehingga kurang mendapatkan pengawasan dari pihak pimpinan,

akibatnya masyarakat khawatir terdapat beberapa rumah yang masih harus direnovasi ulang oleh para penghuninya.

Kondisi berikutnya yang dijadikan kriteria yakni kondisi air bersih dimana diharapkan lebih baik untuk akses air bersih di lokasi baru dibandingkan di bantaran sungai di mana persepsi ini muncul karena mereka bersedia menempuh jarak 4 km untuk mendapatkan air bersih. Menurut masyarakat sebelum adanya jaringan air mereka harus mengambil air bersih dari sungai yang ada lalu di bawa ke rumah, tetapi saat ini menurut mereka jauh lebih baik. Masyarakat berpendapat bahwa kondisi air bersih tidak baik di mana persepsi ini muncul karena menurut mereka untuk mendapatkan air bersih mereka harus berjalan jauh 4 km yang membuat mereka segan. Bencana banjir akibat tinggal di bantaran sungai tersebut membuat sumber air bersih yang sudah ada sebelumnya menjadi berkurang. Menurut masyarakat sebelum bencana terjadi mereka dapat dengan mudah memperoleh air bersih meskipun jarak tempuh untuk mengambil air tersebut tidaklah dekat. Jaringan air yang ada pada tempat relokasi permukiman diharapkan tidak seperti sebelumnya.

Kondisi listrik juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan sebab mereka menganggap kondisi penerangan di lokasi bantaran sunga cukup baik sehingga dibandingkan saat mereka menetap di bantaran sungai dimana persepsi ini muncul karena meskipun tidak tersedia jaringan listrik mereka bersedia mengadakan penerangan sendiri dengan menggunakan petromak dan lampu tempel. Menurut beberapa masyarakat jaringan listrik yang tersedia sekarang dapat merata, sehingga setiap rumah terdapat jaringan listrik sendiri karena menurut mereka di bantaran sungai sudah ada jaringan listrik sedangkan saat ini

diharapkan di permukiman terdapat jaringan listrik dengan penerangan yang lebih baik dan stabil.

Kondisi permukiman yang baik tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik semata, tetapi salah satunya juga dari keamanan lingkungan yang terdapat di permukiman tersebut. Keamanan yang diutarakan dalam penelitian ini adalah keamanan lingkungan dari bahaya banjir, kebakaran dan kriminalitas. Ketenangan dan kenyamanan warga yang hidup di dalamnya sangat bergantung pada tingkat keamanan ketiga hal tersebut. Barang-barang kepemilikan warga akan aman bila lingkungan tersebut terhindar dari bahaya banjir, kebakaran dan kriminalitas. Hal ini bisa dimaklumi karena kondisi area studi terletak di dataran rendah dan rawan banjir sehingga mereka bersepakat untuk memilih perumahan yang lebih baik. Dengan kondisi area yang berada di tempat yang lebih rendah masyarakat merasa keamanan tempat tinggal yang sekarang dekat dengan ancaman bencana banjir susulan atau banjir yang akan datang. Keadaan ini membuat masyarakat merasa kurang nyaman untuk tinggal dan merasa was-was atau khawatir jika ada bencana banjir lagi. Kondisi kebakaran yang pernah dialami ketika bermukim saat ini sebanyak 35% menyatakan buruk dan 19% menyatakan sangat baik. Maksudnya mereka pernah mengalami kebakaran ketika mereka bermukim di bantaran sungai. Hal ini bisa dimaklumi karena kondisi perumahan saat ini merupakan kayu dan mempunyai jarak antar rumah yang kurang aman dari bahaya kebakaran sehingga mereka bersepakat untuk membutuhkan kondisi perumahan yang lebih baik. Tidak adanya jarak antar rumah tersebut dapat membuat api yang menjalar ketika ada kebakaran dimana dapat secara langsung dapat merembet ke rumah yang lainnya. Sehingga jika terjadi kebakaran

masyarakat sekitar kebakaran tersebut maka akan terjadi kesulitan mengantisipasi terlebih dahulu ketika merembet ke rumah mereka. Dari hasil survey yang dilakukan mengenai kriminalitas yang pernah dialami ketika bermukim saat sebanyak 17% menyatakan buruk dan 19% menyatakan sangat buruk karena mereka pernah mengalami tindakan kriminalitas ketika bermukim di bantaran sungai. Tindak kriminal menurut beberapa masyarakat mungkin dikarenakan orang yang melakukan tindak kriminal tersebut juga ikut mengalami musibah bencana banjir, sehingga mungkin untuk sementara kriminalitas meningkat ketika adanya bencana banjir. Hal ini disebabkan barang mereka pernah kecurian padahal sewaktu di bantaran sungai. Kriminalitas yang terjadi pasca bencana tersebut masih tetap ada meskipun tidak sesering dan sebesar sebelum bencana banjir. Dari hasil survey yang dilakukan mengenai senang atau tidak senang bermukim di wilayah studi masyarakat yang menyatakan kurang senang tinggal di wilayah studi ada sebanyak 19 orang dan 21% yang menyatakan tidak senang, persepsi ini muncul karena menurut responden kondisi saat ini serba kesulitan misalnya akses fasilitas rumah, dan keamanan dari bencana banjir. Masyarakat menyatakan bahwa keadaan saat ini merasa tidak senang sebab jauh dengan kerabat dekat yang dulu rumahnya berdekatan.

Ketersediaan fasilitas, lengkap tidaknya fasilitas yang ada dapat mencerminkan perkembangan keadaan masyarakat di lokasi yang bersangkutan. Pada umumnya makin berkembang suatu masyarakat makin lengkap fasilitas sosial-ekonomi yang dimilikinya, sesuai dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan. Kemudahan hubungan dan komunikasi, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan faktor kelengkapan fasilitas. Karena kemudahan hubungan dan

komunikasi akan berjalan dengan baik seiring dengan kelengkapan fasilitas seperti jaringan utilitas dan jalan yang makin baik, serta tidak lupa pula sarana pendidikan, kesehatan, dan perbelanjaan. Akan sangat membantu penghuni pemukiman tersebut guna keberlangsungan hidup mereka. Sesuai anggaran dana di dalam pembangunan relokasi permukiman maka oleh Pemerintahan Tana Tidung membangun fasilitas Peribadatan yakni masjid dan gereja. Pembangunan Masjid dan Gereja ini didasari oleh mayoritas penghuni relokasi permukiman pada beberapa desa di Bantaran Sungai. Di dalam mengatasi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, penduduk relokasi permukiman menggunakan fasilitas di pusat kota.

Kabupaten Tana Tidung khususnya pada lokasi yang rawan bencana seperti bantaran sungai masih tertinggal dalam pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Artinya jalan untuk menuju sasaran ideal yang berupa pembangunan manusia seutuhnya yang ditandai dengan kualitas sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Tana Tidung untuk bisa segera terwujud masih membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih serius.

peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) cukup penting dalam mengatasi dan memberikan berbagai pertolongan pada masyarakat yang tertimpa bencana. Dokumen RPB Kabupaten Tana Tidung berisikan strategi serta program yang akan dilakukan oleh BPBD sebagai upaya penurunan risiko bencana di wilayah Kabupaten Tana Tidung dimana program tersebut merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Tana Tidung. Penyusunan dokumen ini didasarkan atas hasil kajian risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang kemudian dijabarkan ke dalam program kegiatan penanggulangan bencana beserta pagu indikatif anggaran yang sesuai. Ruang lingkup RPB Kabupaten Tana Tidung terbagi atas ruang lingkup geografis, ruang lingkup tahap bencana, ruang lingkup tipe bencana dan pola umum penyelenggaraan.

Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (*hazard potency*) yang sangat tinggi, beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 2 (dua) kelompok utama potensi bencana di wilayah Indonesia yaitu potensi bahaya utama (*main hazard*) dan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*). Potensi bahaya utama (*main hazard*) dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusan gunung api, peta potensi bencana banjir. Sedangkan peta potensi bencana ikutan (*collateral hazard*) dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan dan kepadatan industri berbahaya.

Kondisi geografi dan demografi merupakan dua faktor penting dan mendasar yang menentukan keberhasilan pembangunan. Kondisi geografi akan memberikan gambaran tentang ketersediaan sumberdaya alam, mulai dari luas lahan, mineral dan bahan tambang yang terkandung di dalamnya, hingga fisiografi lahan beserta flora dan fauna yang berada di atasnya. Sedangkan,

kondisi demografi merupakan gambaran tentang ketersediaan sumberdaya manusia, baik ditinjau dari aspek kualitas maupun kuantitasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung.

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten ini kemudian di sahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi Kabupaten ke-10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilantikannya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 tentang pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, maka Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu kabupaten pada wilayah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Kesejahteraan pada dasarnya memiliki dimensi yang luas dan beragam. Salah satu indikator yang dapat merepresentasikan hal ini melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Aspek penting dalam pembangunan daerah yang meliputi (1) Aspek Geografis dan Demografis; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Pelayanan Umum; (4) Aspek Daya Saing Daerah, pada dasarnya diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia itu sendiri, sebagai tujuan bagi pembangunan daerah. Dari keempat aspek tersebut, diarahkan untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melakukan pengelolaan yang lebih sistematis dan terarah agar dapat sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada, serta dikelola dalam rangka keharmonisan lingkungan.

Seluruh aspek tersebut bersinergi dalam mewujudkan peningkatan IPM sebagai tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kehidupan sebuah rumah tangga di suatu lingkungan permukiman tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan terhadap tuntutan ekonomi mereka. Karena tanpa adanya kondisi-kondisi sosial yang menunjang seperti kondisi kesehatan, pendidikan dan relasi sosial yang dimiliki suatu rumah tangga, maka kegiatan rumah tangga untuk memenuhi tuntutan ekonomi juga akan mengalami gangguan. Tanpa adanya kondisi kesehatan yang baik seseorang tidak beraktifitas secara optimal, begitu pula halnya dengan kondisi pendidikan yang merupakan modal utama dalam membentuk kemampuan manusia, dan relasi sosial yang dimiliki suatu rumah tangga akan menunjang kehidupan mereka di suatu lingkungan. Rumah tidak hanya menjadi kebutuhan individual melainkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seseorang yang telah terpenuhi kebutuhan akan rumah tidak berdiri sendiri, melainkan hadir bersama-sama dengan orang lain yaitu masyarakat lingkungannya. Karena orang tidak mungkin hidup sendirian, maka kehadirannya ke dalam suatu rumah mau tidak mau dipengaruhi oleh masyarakat lingkungan sekelilingnya.

Perubahan pada kondisi perekonomian rumah tangga adalah salah satu determinan penting dalam menjelaskan perubahan taraf hidup rumah tangga yang direlokasi. Dengan segala faktor-faktor yang menjadi nilai lebih maupun nilai kurang dari suatu lokasi permukiman, seseorang maupun suatu rumah tangga tentu membutuhkan dukungan perekonomian yang kuat untuk dapat menyesuaikan diri pada suatu permukiman. Ketika suatu rumah tangga diharuskan untuk meninggalkan lingkungan permukiman yang sudah ada menuju suatu

lingkungan yang baru, maka kondisi perekonomian yang sudah stabil tersebut akan dipaksa untuk kembali menyesuaikan diri lagi terhadap kondisi yang baru tersebut. Hal tersebut menyebabkan beberapa perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian rumah tangga akibat relokasi permukiman.

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pendapatan rumah tangga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan rumah tangga. Pada tingkat pendapatan rumah tangga yang sangat rendah maka pengeluaran rumah tangga adalah lebih besar dari pendapatannya. Ini berarti bahwa pengeluaran konsumsi bukan saja dibiayai oleh pendapatannya tetapi juga dari sumber-sumber lain, seperti tabungan yang dibuat di masa lalu, dengan menjual harta kekayaannya, atau dari meminjam. Pada suatu tingkat pendapatan rumah tangga yang cukup tinggi, konsumsi rumah tangga akan sama besarnya dengan pendapatan rumah tangganya. Apabila pendapatan rumah tangga mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi, maka rumah tangga tidak akan menggunakan seluruh pendapatan yang dapat dibelanjakan tersebut. Ini berarti pengeluaran rumah tangga adalah lebih rendah dari pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang tidak digunakan untuk belanja tersebut merupakan tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga.

Pengeluaran suatu rumah tangga akan menunjukkan tingkat konsumsinya, Aktivitas konsumsi dapat digambarkan sebagai pemuasan dari keinginan dan kebutuhan materi melalui penyediaan barang-barang seperti makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lainnya. Aktivitas konsumsi secara umum tidak diharapkan sebagai suatu kontribusi terhadap sumber daya keuangan atau fisik suatu rumah tangga, terkecuali konsumsi untuk barang tertentu yang tahan lama

bagi penggunaan di masa akan datang. Berbagai solusi penanggulangan di atas sesuai dengan pedoman tata ruang wilayah ketika merelokasi warga yang terkena dampak bencana. Dokumen rencana tata ruang menetapkan ruang dengan fungsi perlindungan bencana pada lahan rawan longsor dengan tujuan agar masyarakat dan aktivitas yang mereka kembangkan tidak menjadi korban apabila bencana longsor terjadi. Dalam praktik penyusunan ruang di Indonesia, dokumen tata ruang bersifat hirarkis. Mulai dari dokumen yang bersifat makro yang berlaku pada level nasional hingga dokumen detil yang hanya berlaku pada kawasan tertentu saja. Dokumen tata ruang tersebut adalah: *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)*; merupakan dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Dokumen ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level provinsi dan kabupaten/kota. *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)*; merupakan penjabaran RTRWN pada masing-masing provinsi. Dokumen ini berlaku pada masing-masing provinsi yang diaturnya, sebagai contoh RTRW Kabupaten Tana Tidunghanya berlaku pada wilayah hukum Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dokumen ini dijabarkan dalam bentuk dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan dokumen detil lainnya *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK)*; merupakan penjabaran dari dokumen RTRWN dan RTRWP pada level kabupaten/ kota. Dokumen ini berlaku pada masing-masing wilayah administratif kabupaten/ kota.

Rencana Detil Ruang dalam bentuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); merupakan penjabaran detil dari dokumen RTRWK dan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah

kabupaten/ kota dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 20/PRT/M/2011 tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota menegaskan bahwa RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/ kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis kota (Bab II, Pasal 3 Ayat 1).

Permen PU tersebut secara jelas menyebutkan bahwa RDTR disusun untuk kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Sehingga, berdasarkan Permen PU ini, RDTR tidak mencakup wilayah di luar kawasan perkotaan. Hal ini berbeda dengan RDTR sebelum adanya Permen PU ini, dimana wilayah perencanaan meliputi seluruh kawasan kecamatan, selain kawasan perkotaan, sedangkan penataan kawasan yang berada di luar perkotaan, penataan dan pemanfaatannya merujuk kepada RTRW kabupaten di atasnya.

Prinsip dasar dari Permen PU No. 20/PRT/2011 bahwa pemanfaatan dan konflik ruang yang kerap terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan adalah ruang pada kawasan perkotaan. Selain itu, jenis penggunaan ruang di perkotaan juga lebih banyak dan beragam. Sementara penggunaan ruang di luar kawasan perkotaan tidak banyak jenis penggunaannya, sehingga

tidak diperlukan perencanaan secara detail. Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Tidung, RDTR ini diperlukan karena hampir sebagian besar wilayahnya bersifat padat penduduk, padat bangunan, dan berfungsi sebagai daerah industri maupun pendukung industri. Kondisi ini perlu diketahui dengan benar karena bilamana terjadi bencana, akan mengakibatkan kerugian material dan korban jiwa yang cukup besar. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (7). Saat tanggap darurat dan pemulihan segera (*early recovery*) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya; Penentuan status keadaan darurat bencana; Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; Pemenuhan kebutuhan dasar; Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Pasca Bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tana Tidung pada tahap pasca bencana meliputi: Rehabilitasi; dilakukan melalui kegiatan: Perbaikan lingkungan daerah bencana; Perbaikan prasarana dan sarana umum; Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; Pemulihan sosial psikologis; Pelayanan kesehatan; Rekonsiliasi dan resolusi konflik; Pemulihan sosial ekonomi budaya; Pemulihan keamanan dan ketertiban; Pemulihan fungsi pemerintah; dan Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi; dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi: Pembangunan kembali pra sarana dan sarana; Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan Peralatan

yang lebih baik dan tahan bencana; Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi; Kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Terdapat 3 upaya yang tercantum di dalam RPB bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni : Pengurangan tingkat ancaman (*Hazard Reduction*), Pengurangan tingkat kerentanan (*Vulnerability Reduction*) dan Peningkatan kapasitas (*Capacity Development*). Prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Tana Tidung akan disesuaikan tingkat risikonya (*risk*) yang didalamnya terdapat unsur bahaya/ ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*Capacity*) daerah berdasarkan hasil pemetaan risiko serta masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusunan RPB ini dan menjadi acuan dalam penilaian evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pendekatan perilaku dalam manajemen adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan. Manajemen organisasi adalah mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan budaya yang ada; apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan; apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya; apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan; dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumber dayanya. Efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang

sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Jadi disini bukan hanya menitikberatkan pada pencapaian tujuan belaka melainkan juga pada proses mengelola sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya, kondisi *intern* organisasi pengaruh lingkungan luar dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan urusan pemerintah dan dalam penyusunan Rencana Strategis dalam optimalisasi adanya berbagai aspek sosial, ekonomi dan budaya agar warga relokasi tidak kehilangan adat istiadat, warisan budaya serta kenyamanan beribadah serta bekerja termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung secara terperinci dalam rangka optimalisasi penyesuaian warga bencana di tempat baru dari lokasi sebelumnya.

Mengacu pada hasil identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung yang diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat dinyatakan isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang mendukung optimalisasi konsolidasi sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat bencana sehingga masyarakat tidak merasa kehilangan ataupun kurang diperhatikan sebab pemerintah tidak hanya memberikan dukungan yang bersifat fisik namun juga non fisik

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada pengurangan resiko bencana, penguatan kapasitas penanggulangan bencana, optimalisasi instrumen pengendalian, pemanfaatan ruang dalam pengurangan resiko bencana, mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan serta pemulihan wilayah terdampak.
2. Sistem Pengelolaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung fokus pada penerapan perbaikan khususnya pada kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek perubahan transformasi tersebut antara lain dapat dilihat dari kondisi ekonomi, sosial serta persepsi masyarakat yang terkena bencana terhadap rencana kondisi perumahan dan fasilitas yang akan dibangun termasuk masukan terkait kebijakan ekonomi antara ditujukan untuk terjadi untuk mengoptimalkan perubahan pendapatan dan perubahan pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi berbagai kebutuhan serta pemilikan aset.
3. Sistem penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam Mitigasi, mengatasi bencana dan dampak bencana berkaitan dengan kebijakan kondisi sosial yang dijelaskan mengenai perubahan yang terjadi dalam kondisi kesehatan, kondisi pendidikan, aktivitas kemasyarakatan dan relasi sosial. Analisis sosial dapat

dianalisa dari perubahan yang mungkin terjadi pada kondisi sosial warga yang terkena bencana kemudian pengelolaan persepsi masyarakat terhadap kondisi perencanaan dalam mengatasi bencana serta perumahan dijelaskan mengenai tanggapan masyarakat terhadap berbagai kondisi lingkungan yang akan dibangun.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

### a. Institusi (BPBD Kabupaten Tana Tidung)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan sistem kelola, perencanaan mengenai alokasi pemilihan lokasi yang tepat untuk para warga yang terkena bencana. Berdasarkan hal tersebut, saran bagi institusi

1. Hendaknya insititusi perlu melakukan survei lokasi dengan memperhatikan pemerataan, yang ditinjau dari kebutuhan dan ketersediaan berbagai sumber daya alam yang dibutuhkan warga
2. Hendaknya institusi perlu melakukan evaluasi terkait dengan informasi lokasi, sarana serta berbagai fasilitas yang kemudian disosialisasikan agar warga memahami dengan jelas lingkungan, kondisi yang baru akan ditempati
3. Hendaknya instituri meningkatkan pelaksanaan program terkait pengembangan berbagai sarana fasilitas melihat sumber daya manusia yang masih minim yang bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan berbagai kebutuhan masyarakat.

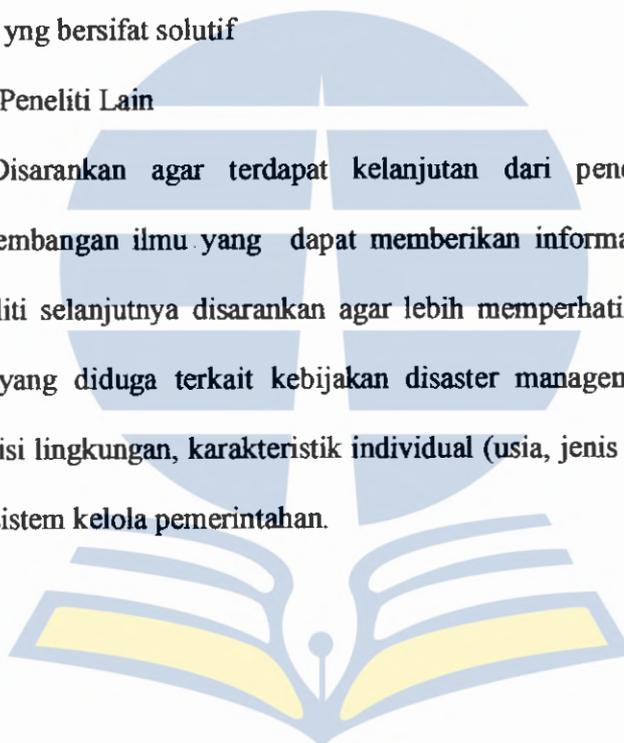
4. Berbagai aspek di atas dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan masukkan dalam merumuskan kebijakan pihak Pemerintah Tana Tidung dalam menentukan kriteria wilayah relokasi yang sesuai.

b. Bagi Masyarakat

1. Diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dan adaptasi dengan kondisi lingkungan kerja akibat adanya perubahan kondisi pasca bencana alam.
2. Hendaknya masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat yang bersifat solutif

c. Bagi Peneliti Lain

Disarankan agar terdapat kelanjutan dari penelitian ini sehingga pengembangan ilmu yang dapat memberikan informasi secara lebih luas. Peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memperhatikan variabel-variabel lain yang diduga terkait kebijakan disaster managemen seperti misalnya kondisi lingkungan, karakteristik individual (usia, jenis kelamin, pendidikan) dan sistem kelola pemerintahan.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Muhammad. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Bandura. (2006). *Guide for Constructing Self Efficacy Scales*. In Fajares & T. Urdan Eds. *Self Efficacy Beliefs of Adolescents*. Greenwich, CT: Information Age Publishing.
- Budiharjo, A.. (2016). *Knowledge Management*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing.
- Burhan, B.(2007). *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Burhan, B.(2014). *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia
- Edy, Sutrisno. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Keban, YT.(2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Malang: Taroda.
- Knight, T., & Howes, T., (2003). *Knowledge Management: A Blueprint for Delivery*, Butterworth Heinemann, Burlington MA
- Kuhl, L., & Beckmann, J. (1985), *Action-Control: From Cognition to Behavior*. Heidelberg, Springer
- Mangkunegara, Anwar. (2010). *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurlaila, T. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru: Yayasan Aini Syam
- Pasolong, Hanif. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ramli, S. (2009). *Smart Safety: Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif*, Edisi ke 1. Jakarta: PT Dian Rakyat, Jakarta.

Robbins dan Timothy, A. Judge. (2013). *Organizational Behavior Edition 15*, New Jersey: Pearson Education.

Sondang P. Siagian. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta

Surjadi.(2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama

### **Jurnal**

Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). Theory-Based Behavior Change Interventions. *Journal of Health Psychology, Vol. 10, No. 1, pp. 27–31*.

Ajzen, I., (1991). The Theory of Planned Behavior: Organizational Behavior and Human Decision Processes. *Journal of Health Psychology, Vol. 50, pp. 179-211*.

Busco & Robert.(2011). Management Accounting System and Organizational Culture. *Qualitative Research in Accounting Management Vol 8 No.4 pp 320-357*.

Erniati, Sikumbang.(2016). Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Asoek Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Kota Padang). *Jurnal Thesis Universitas Andalas*

Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) terbitan tahun 2013 Badan Penanggulangan Bencana Nasional

Inigo et al.(2012). Organizational Culture as a Source of Change in Trade Unions. *Employee Relations Vol 34 No.4 pp 394-410*.

Mamahit, Rendry.(2013). Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Kepuasan Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Vol 1 No.4 ISSN 2303-1174*

Pomalingo, R, Silvy L & Yantje U.(2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15 No.5*

Putra, Rhesa., W.(2015). Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kutai Barat. *Journal Ilmu Pemerintahan 3 (4)*.

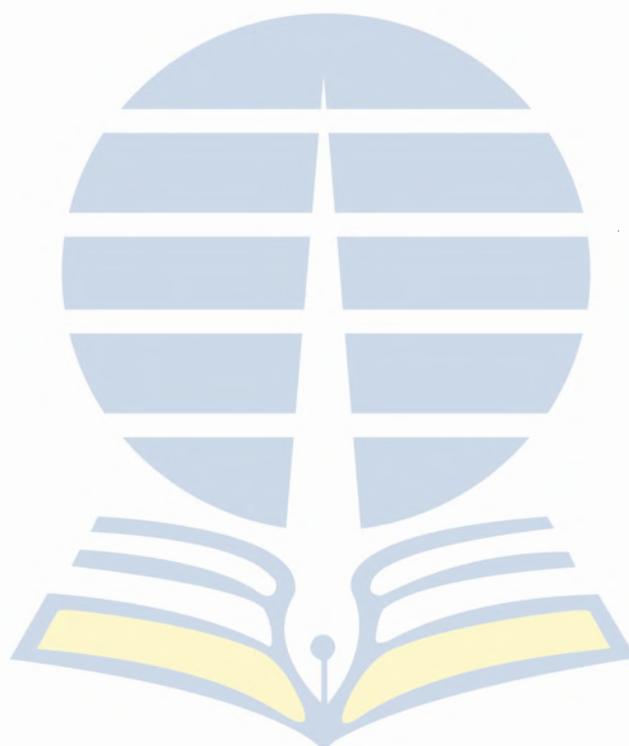
Suartini, K, Piers, A, dan Ketut I.(2015). Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014. *Jurnal Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Udayana Bali*

## **Undang-Undang**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 20/PRT/M/ 2011 tentang  
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/  
Kota

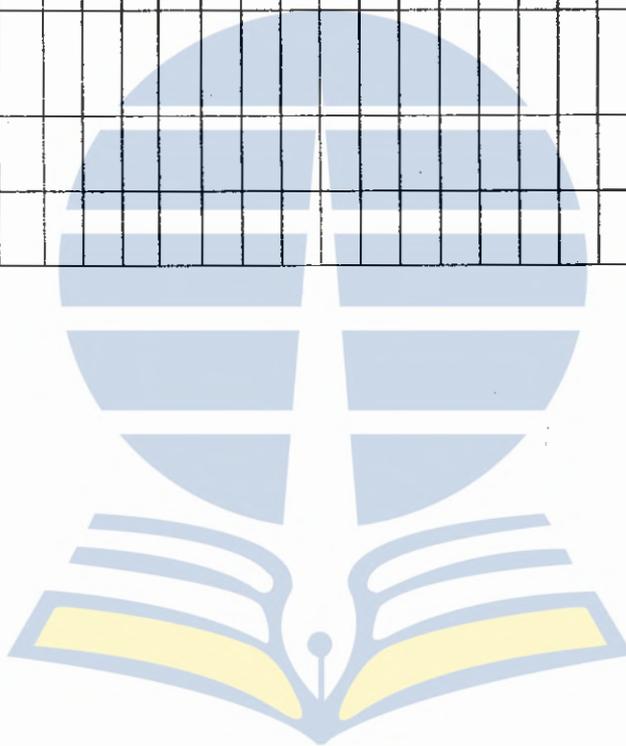
Perda No. 5 Tahun 2011 dan Perda No. 10 Tahun 2012

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana



## LAMPIRAN I JADWAL PENELITIAN

AKTIVITAS	2018																											
	Juni				Juli				Agustus				Septembe				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan																												
Pelaksanaan Riset Awal																												
Pengembangan Riset																												
Analisis Data																												
Penyusunan Laporan Penelitian																												
Bimbingan																												
Ujian Seminar																												



## LAMPIRAN II KUESIONER

Narasumber : Kepala Pelaksana

1. Bagaimana Bapak/Ibu memimpin petugas OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung terkait perencanaan alternatif pencegahan bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
2. Bagaimana Bapak/Ibu memimpin pengorganisasian pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensi kerjasama antar petugas dalam mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
3. Bagaimana Bapak/Ibu memimpin untuk mulai menggerakkan sumber daya OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mencapai tujuan organisasi guna mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
4. Bagaimana Bapak/Ibu memimpin dalam melakukan tindakan pengawasan atas berbagai penerapan kebijakan yang telah diberlakukan dalam rangka mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
5. Bagaimana Bapak/Ibu memimpin dalam melakukan evaluasi dalam menilai keseluruhan proses yang telah dilakukan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mencapai tujuan organisasi guna mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung dari perencanaan hingga pengawasan ?

Narasumber : Kasubag Pogram dan Keuangan

1. Bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu dalam perencanaan alternatif pencegahan bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam bentuk sistem pengorganisasian guna meningkatkan kerjasama antar petugas dalam mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
3. Bagaimana peran Bapak/Ibu menggerakkan sumber daya OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

4. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam melakukan pengawasan atas berbagai penerapan kebijakan yang telah diberlakukan dalam rangka mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
5. Bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu dalam proses evaluasi guna mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung dari perencanaan hingga pengawasan ?

Narasumber : Kabid Kebencanaan

1. Bagaimana Bapak/Ibu bermusyawarah dengan sesama petugas terkait perencanaan alternatif pencegahan bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
2. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan pengaturan pengorganisasian sesuai perintah atasan pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensi kerjasama antar petugas dalam mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
3. Bagaimana Bapak/Ibu menggerakkan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi guna mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung sesuai kebijaka atasan ?
4. Bagaimana Bapak/Ibu mengawasi petugas dan bawahan atas berbagai penerapan kebijakan yang telah diberlakukan dalam rangka mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
5. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan penilaian serta evaluasi kinerja yang telah dilakukan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung guna mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

Narasumber : Kabid Rekonstruksi dan Rehabilitasi

1. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan hasil perencanaan rekonstruksi yang telah diberlakukan sebagai kebijakan terkait perencanaan alternatif pencegahan bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
2. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan hasil diskusi pengorganisasian mengenai rekonstrukri pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tana Tidung dalam mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

3. Bagaimana Bapak/Ibu mulai bekerjasama menggerakkan sumber daya dalam rangka melaksanakan rekonstruksi sesuai perintah atasan dalam guna mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
4. Bagaimana Bapak/Ibu berkoordinasi dengan tetap melakukan pengawasan atas proses kerja rekonstruksi yang dilakukan agar sesuai dengan penerapan kebijakan yang telah diberlakukan dalam rangka mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
5. Bagaimana Bapak/Ibu melakukan evaluasi atas rekonstruksi yang telah dilakukan guna mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

Narasumber: LSM Penganggulangan Bencana

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui OPD yang menangani bencana di Kabupaten Tana Tidung?
2. Apakah Bapak/ Ibu sudah berkoordinasi dengan OPD tersebut, dalam penanggulangan bencana maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung?
3. Apakah yang dilakukan OPD tersebut, sudah maksimalkah atau belum menurut bapak/Ibu dalam mengatasi bencana dan kebakaran di kabupaten Tana Tidung?
4. Apakah kontribusi LSM penganggulangan Bencana yang bapak/Ibu terhadap OPD tersebut?
5. Bagaimana LSM Penganggulangan Bencana mengawasi OPD tersebut dalam mengatasi bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?

NaraSumber : Tokoh Masyaakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada OPD yang menanganani Bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?
2. Apakah yang menjadi harapan Bapak /Ibu terhadap OPD tersebut?
3. Bagaimana Kontribusi Bapak/ Ibu dalam mengatasi bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?

- 4 Apakah Bapak/Ibu setuju jika pemerintah melakukan relokasi penduduk yang terdampak bencana ketempat yang aman?
- 5 Apakah Bapak / Ibu mengetahui akan di bentuk desa tangguh bencana diKabupaten Tana Tidung?

Narasumber : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

- 1 Apakah Bapak / Ibu mengetahui ada OPD yang menanggapi Bencana dan kebakaran Hutan diKabupaten Tana Tidung?
- 2 Apakah yang menjadi harapan Bapak /Ibu terhadap OPD tersebut?
- 3 Apakah anggaran OPD yang menanggapi Bencana dan kebakaran Hutan diKabupaten Tana Tidung sudah memadai menurut Bapak/Ibu?
- 4 Apakah Bapak / Ibu mengetahui kegiatan OPD tersebut dalam mengatasi bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?
- 5 Bagaimana Bapak/Ibu melakukan pengawasan terhadap OPD tersebut?

Narasumber : Jurnalis

- 1 Apakah Bapak / Ibu mengetahui ada OPD yang menanggapi Bencana dan kebakaran Hutan diKabupaten Tana Tidung?
- 2 Bagaimana Kontribusi Bapak/ Ibu dalam mengatasi bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?
- 3 Apakah Bapak/Ibu mengetahui daerah rawan bencana di kabupaten Tana Tidung?
- 4 Apakah Bapak / Ibu mengetahui kegiatan OPD tersebut dalam mengatasi bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?
- 5 Apakah yang menjadi harapan Bapak /Ibu terhadap OPD tersebut?

Narasumber : Aktivistis Lingkungan

- 1 Apakah Kontribusi Bapak/ Ibu dalam mengatasi bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?
- 2 Apakah Bapak/Ibu mengetahui Data daerah rawan bencana di kabupaten Tana Tidung?

- 3 Apakah Bapak/Ibu setuju jika pemerintah melakukan relokasi penduduk yang terdampak bencana ketempat yang aman?
- 4 Apakah Bapak/ Ibu bersedia bekejasama dengan OPD tersebut dalam mengatasi bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?
- 5 Apakah Bapak / Ibu berkomitmen menjaga Lingkungan kabupaten Tana Tidung dari bencana dan Kebakaran Hutan?

Narasumber : Relawan Bencana Alam

- 1 Apakah Bapak / Ibu mengetahui ada OPD yang menanggapi Bencana dan kebakaran Hutan diKabupaten Tana Tidung?
- 2 Apakah Kontribusi Bapak/ Ibu dalam mengatasi bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?
- 3 Apakah Bapak /Ibu bersedia sewaktu-waktu di perlukan oleh OPD yang menanggapi Bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?
- 4 Apakah yang menjadi harapan Bapak / Ibu terhadap OPD tersebut?
- 5 Apakah Bapak/Ibu bersedia menjaga lingkungan sekitar dari potensi Bencana dan Kebakaran Hutan diKabupaten Tana Tidung?

